

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Abad ke-20 bukan hanya menjadi saksi penentuan wilayah Indonesia yang baru dan suatu penancangan kebijakan penjajahan yang baru. Masalah-masalah dalam masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan yang begitu besar sehingga dalam masalah-masalah politik, budaya, dan agama, rakyat Indonesia menempuh jalan baru. Perkembangan-perkembangan pokok pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai konsep kenegaraan Indonesia melalui organisasi pergerakan serta dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas.<sup>1</sup>

Dengan demikian terciptalah dasar baru bagi gerakan kemerdekaan nasional. Gerakan kemerdekaan nasional ini mendapat dorongan pula dari pemikiran-pemikiran tokoh internasional baik Asia Timur maupun Barat. Kesadaran bangsa-bangsa Timur timbul, demikian pun kepercayaan akan hasilnya gerakan kemerdekaan menjadi bertambah kuat. Kelas-kelas baru yang sedang muncul di

---

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2008), p. 352-353.

Indonesia menyiapkan diri untuk memegang tampuk kendali perlawanan menghadapi penindasan-penindasan nasional dan sosial.<sup>2</sup>

Pada abad ke-20 masa kolonial Belanda adalah zaman sejarah pemikiran, masuknya paham-paham pemikiran Barat ke Indonesia serta banyaknya kaum pribumi yang melanjutkan jenjang pendidikan di Belanda. Termasuk pemikiran Komunisme dan Islamisme serta nasionalisme sekuler, dari sinilah para tokoh bangsa mulai menjalani dan mencari konsep kenegaraan yang sesuai dengan Indonesia.

Masuknya tentara Jepang dengan penyerahan tanpa syarat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Pada tahun 1944 Jepang mengalami serangan udara serikat, Jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang oleh angkatan perang Serikat dari Papua Nugini, kepulauan Solomon dan kepulauan Marshall, Maka seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Menghadapi situasi yang kritis itu, Pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 maret 1945 telah mengumumkan

---

<sup>2</sup> S. J. Rutgers, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Yogyakarta : Ombak, 2012), p. 1-2.

pembentukan Badan penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>3</sup>

Berita kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira oleh masyarakat Indonesia. Kalangan pemikir nasional seperti Soepomo yang sudah lama menginginkan kemerdekaan, menunggu janji – janji Jepang. Keinginan kaum nasionalis ini mulai dilakukan ketika dibentuk BPUPKI oleh pemerintah Jepang. Maka persiapan BPUPKI mulai dimanfaatkan dan dijalankan sebaik – baiknya oleh kaum nasionalis. BPUPKI memiliki dua masa sidang, yaitu masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945.<sup>4</sup> Dipersidangan ini kaum nasionalis mulai merumuskan ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia.

Badan Penyelidik diumumkan oleh Jepang, nama – nama para anggota kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang Peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa.<sup>5</sup> Anggota

---

<sup>3</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), p. 66 – 67.

<sup>4</sup> Aris Hardianto, *Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 1 (2016), p. 44.

<sup>5</sup> Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta : Paradigma, 2004), Pp 36.

BPUPKI membentuk Konstitusi Pemerintahan Indonesia yang ideal. Pembicaraan diawali dengan pembahasan mengenai dasar – dasar Negara. Sebagian besar anggota BPUPKI memberikan gagasan terkait dasar Negara yang akan dibentuk.

BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wediodingrat, didampingi dengan dua orang wakil ketua, yaitu Yasuo Ichibangase (anggota istimewa, orang Jepang) dan Raden Pandji Doeroso yang sekaligus merangkap sekretaris.<sup>6</sup> Disidang BPUPKI adanya anggota yang berlatar belakang golongan gerakan islam menginginkan dasar – dasar negara digali berdasarkan ajaran Islam, sedangkan anggota lain dari golongan gerakan kebangsaan menginginkan agar dasar negara digali dari nilai – nilai budaya bangsa. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan dari para peserta adalah pandangan Soepomo.

Tokoh Pendiri bangsa seperti Soekarno dan Mohammad Hatta mulai menggagas bentuk Negara Indonesia yang ideal di persidangan BPUPKI. Tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia selain Soekarno dan Hatta adalah Soepomo, merupakan “ikon” penting dalam dunia politik hukum di Indonesia. Soepomo adalah seorang penggagas penting pembentukan Dasar

---

<sup>6</sup>Julius Pour, *Djakarta 1945 Awal Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2013), p. 24

Negara dan UUD 1945. Soepomo merupakan sosok pemikir yang problematik dan merupakan seorang tokoh kunci yang menggagas berdirinya Indonesia menjadi sebuah republik yang berdaulat. Di sisi lain gagasannya terutama dirujuk pada pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, menunjukkan sebuah gambaran pemikiran seorang yang totaliter, dengan konsep negara integralistik.<sup>7</sup>

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari.<sup>8</sup> Sidang pertama tersebut berturut – turut yang tampil untuk menyampaikan pendapat atau berpidato adalah Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pidato di sidang BPUPKI ke tiganya menyampaikan menurut pandangan masing–masing yang berbeda. Soepomo memusatkan pembicaraannya kepada dasar negara Indonesia Merdeka. Dasar–dasar yang diajukannya untuk Indonesia Merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat.<sup>9</sup>

Soepomo yang berpendidikan Barat ini mengajukan kepada komisi pilihan antara tiga konsep kenegaraan, yaitu yang bersifat individualistis, yang bersifat marxistis, dan yang bersifat integral.

---

<sup>7</sup> Daniel Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – jejak Negara Integralistik Indonesia, Jurnal Jentera* Vol. 3 (10) (Oktober 2005), p. 5.

<sup>8</sup> Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila...*, p. 37.

<sup>9</sup> Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 69.

Gagasan negara individualistis, yang diambil dari bentuk demokrasi Barat, Soepomo tolak karena di dalamnya terkandung suatu egoisme individu, konsep negara berdasarkan marxistis dengan teorinya tentang pertentangan golongan, Soepomo tolak karena egoisme kelompok. Soepomo lebih menginginkan sebuah bentuk kenegaraan integral.<sup>10</sup>

Muh.Yamin yang dianggap orang pertama kali mengetengahkan rumusan dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945, yakni hari pertama dari persidangan pertama BPUPKI. Kemudian disusul dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Soepomo. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama.

Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Dengan berakhirnya rapat tanggal 1 Juni tahun 1945 itu selesailah pula seluruh persidangan pertama BPUPK. Persidangan pertama tidak menghasilkan sesuatu kesimpulan atau perumusan. Soepomo yang membawakan suara bernada anti-individualisme dan mengajurkan semangat komunalisme sebagai landasan persatuan dari negara yang akan dibentuk.<sup>11</sup> Yaitu negara

---

<sup>10</sup>Lambert Giebels, *Soekarno Biografi 1901–1950* (Jakarta: Grasindo, 2001), p. 362.

<sup>11</sup> Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta : Grafiti, 2003), p. 48.

integralistik yang dalam pandangannya sesuai dengan adat dan kebiasaan bangsa Indonesia.

Soepomo menjadi tokoh yang mempunyai kontribusi banyak dalam merumuskan konsep dasar negara. Pandangan tentang konsep kenegaraan di Indonesia menjadi banyak perdebatan dengan tokoh lain pada sidang BPUPKI dengan pidatonya di tanggal 31 Mei 1945. Dan Soepomo pernah menjadi ketua panitia kecil perumus UUD 1945, peran dalam penyusunan konstitusi tidak bisa dinafikan atau diragukan. Meskipun, seolah-olah Soepomo tersingkir dalam percaturan ide pada sidang BPUPKI pertama.<sup>12</sup> Namun Soepomo menyerahkan kedaulatan pasar ide itu pada khalayak dan mengabdikan diri pada keputusan bersama.

Soepomo banyak memberikan dasar teoritis pada pokok-pokok pikiran dasar negara dan konstitusi bangsa Indonesia, Soepomo selalu tampil dalam agenda perumusan dan pembentukan konstitusi di Indonesia. Pada saat Indonesia melakukan negosiasi melalui perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Hag, Soepomo dipercaya sebagai Ketua Panitia Konstitusi dan Politik.<sup>13</sup> Soepomo adalah tokoh

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie Dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Pemikiran Hukum adat, dan Konstitusionalisme*, (Yogyakarta : Thafamedia, 2015), p. 34.

<sup>13</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Pemikiran Hukum adat, dan Konstitusionalisme...*, p. 37.

nasional yang sangat berperan penting membangun bangsa Indonesia. Namun keberadaannya sebagai tokoh yang mendirikan dasar negara Indonesia ini, mulai terlupakan. Tidak banyak yang menulis tentang ketokohan Soepomo, satu buku yang membahas biografi Soepomo dari tulisan Drs. A.T. Soegito. Hasil proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional yang berada pada Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih tentang ketokohan Soepomo dan pemikirannya dalam pandangan konsep kenegaraan di Indonesia, yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Peranan Soepomo Dalam Merumuskan Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Biografi Soepomo?
2. Bagaimana Pemikiran Konsepsi Kenegaraan Indonesia Pada Masa Kolonial Hindia Belanda?
3. Bagaimana Pemikiran Soepomo Tentang Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia?



### C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah tersusunnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Biografi Soepomo
2. Kondisi Pemikiran Konsepsi Kenegaraan Indonesia Pada Masa Kolonial Hindia Belanda
3. Pemikiran Soepomo Tentang Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia

### D. Kerangka Pemikiran

Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma–norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), p. 735.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), p. 238.

Dalam kamus bahasa Indonesia, arti dari kata peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, seorang yang mempunyai peranan dan pengaruh besar dalam menggerakkan revolusi. Suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam tugas seorang pemimpin. Istilah peran kerap diucapkan banyak orang, sering kita dengar kata peran dikaitkan dengan posisi seseorang dalam sebuah jabatan.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang nasionalisme, karena nasionalisme identik dengan bangsa dan Negara, dan pembahasan skripsi ini membahas seorang tokoh yang dimana perannya membentuk dasar Negara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan dan perasaan yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya.<sup>17</sup> Paham nasionalisme di Indonesia tumbuh dikalangan masyarakat, karena adanya sistem kolonialisme. Menurut Sartono Kartodirdjo bagaimana nasionalisme itu tumbuh ketika adanya

---

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka 2001), p. 845.

<sup>17</sup> Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Erlangga, 1984), p.11.

situasi kolonial.<sup>18</sup> Nasionalisme merupakan suatu gerakan modern yang lahir pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19, oleh para ilmuwan disebut sebagai abad nasionalisme yang melahirkan negara kesatuan atau setelah rakyatnya dapat membebaskan diri dari kekuatan asing.<sup>19</sup>

Ernes Renan berpendapat bahwa unsur yang dominan dalam kehidupan sosial-politik sekelompok manusia telah mendorong terbentuknya suatu bangsa ialah kehendak untuk bersatu. Jelasnya, kelompok manusia yang hendak membangun suatu Bangsa yang mandiri, harus mempunyai kehendak untuk bersatu dan ingin terus-menerus bersatu. Menurut Sartono Kartodirjo, penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan (*approach*), ialah dari segi mana yang diperhatikan dan unsur-unsur mana yang diungkapkan.<sup>20</sup> Untuk menguraikan masalah-masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan multidimensional (*multidimensional approach*). Yaitu model pendekatan yang tidak hanya mengandalkan satu teori saja, diharapkan dengan menggunakan

---

<sup>18</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme) jilid II* (Yogyakarta: Ombak, 2014), p.69.

<sup>19</sup> Hardi, *Meningkatkan Kesadaran Nasional* (Jakarta : Yayasan Pencinta Sejarah, 1988), p. 52.

<sup>20</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), p. 4.

pendekatan multidimensional kita dapat mengetahui pemahaman secara luas.<sup>21</sup>

Berkenan dengan penelitian ini penulis juga menggunakan sebuah landasan teori yang dikemukakan oleh Kuntowjoyo, yakni teori pemikiran. Sejarah pemikiran adalah sejarah tentang ide, semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, gerakan koperasi dipengaruhi oleh pemikiran Mohammad Hatta, gerakan Pendidikan Taman Siswa dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantoro, gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran KH. Ahmad Dahlan.<sup>22</sup> Soepomo mempengaruhi pemikiran tentang Negara integralistik untuk Dasar Negara Indonesia, dan gerakan pemikiran Soepomo ini yang sesuai bagi Indonesia.

Soepomo mempunyai bakat personal dengan bekal tinggal di negeri Belanda bertahun-tahun saat belajar, memupuk pengetahuan yang luas. Soepomo yang pendiam, sekali bicara mungkin bisa menarik hati rekan diskusinya. Sebagai orang Jawa, Soepomo punya insting yang kuat, membaca perasaan orang dan bersikap sesuai dengan konteks psikologi sosial.

---

<sup>21</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), p. 48.

<sup>22</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013), p. 189.

Belajar di Negeri Belanda membuat banyak pengalaman bagi Soepomo dalam kehidupan sosial. Khususnya dalam ilmu hukum, apalagi ketika itu bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Belanda dan Soepomo belajar di Negeri Belanda. Tapi itulah perjuangan para tokoh bangsa ini yang berjuang melalui pemikiran atau diplomasi, tidak dengan kekerasan fisik. Soepomo memberikan teori yang sesuai dengan dasar Negara Indonesia, yaitu teori integralistik. Menurut pikiran ini Negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam Negara berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar.<sup>23</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

Setelah merumuskan masalah tahapan selanjutnya yaitu metode penelitian. Penulis menggunakan Metodologi Penelitian Sejarah. Maka

---

<sup>23</sup> Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945...*, p. 85.

yang penulis lakukan adalah merupakan penelitian penulisan sejarah, karena objek yang akan dikaji dan diteliti adalah penulisan sumber-sumber sejarah yang menceritakan masa lampau. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini untuk membuat rekonstruksi sejarah yang sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengavaluasi, memverifikasi dan mensitesiskan data-data sehingga diperoleh fakta-fakta sejarah yang kredibel, melalui tahapan penelitian.

Penulis menggunakan rujukan buku *Pengantar Ilmu Sejarah* yang ditulis oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah, diantaranya : pemilihan topik, pengumpulan sumber (*heuristic*), verifikasi (kritik sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan).<sup>24</sup>

### 1. Pemilihan Topik

Tahapan pemilihan topik adalah tahapan dimana penulis menentukan arah mana yang akan ditempuh dan topik pembahasan apa yang akan diambil dalam penelitiannya. Topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada ketertarikan terhadap topik penelitian tertentu atau pengenalan

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013), p.69.

yang lebih dekat tentang hal terjadi disekitarnya. Penulis menggunakan pendekatan emosional karena penulis tertarik dengan pengkajian pemikiran tokoh-tokoh nasional dan sejarah pergerakan nasional. Sedangkan kedekatan intelektual adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada ketertarikan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, data atau sumber-sumber yang diperlukan bisa dicari melalui studi pustaka. penulis menggunakan pendekatan intelektual karena penulis menggunakan sumber studi pustaka sebagai informasi dari topik yang diteliti. Setelah topik ditemukan barulah membuat sebuah rencana penelitian.

## 2. Tahapan Heuristik

Tahapan heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data, Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu Heuriskein, artinya menemukan. Jadi Heuristik adalah proses mencari sumber dan jejak-jejak peristiwa sejarah. Dalam tahapan ini, penyusun mengadakan studi kepustakaan baik kepustakaan pribadi maupun perpustakaan umum yaitu Perpustakaan UIN SMH Banten, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten (PUSDA), Perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Perpustakaan Sahabat Museum Negeri Provinsi Banten. Dari

kunjungan tersebut penulis mendapatkan sumber-sumber yang terkait dengan topik pembahasannya. Peranan Soepomo Dalam Merumuskan Dasar Negara Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945, yaitu Marsillam Simanjuntak dengan judul. *Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945* diterbitkan di Jakarta : Grafitu, 2003, Jimly Asshidiqie dengan judul. *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik : Biografi Intelektal Pemikiran Hukum Adat dan Konstitualisme* diterbitkan di Yogyakarta : Thafa Media, 2015. Soegito dengan judul *Prof. Mr. Dr. R Supomo. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional* di terbitkan di Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1980. Daniel Hutagalung dengan judul *Soepomo dan Jejak – Jejak Pemikiran Negara Integralistik Indonesia* dari Jurnal Jentera Vol. 3, No. 10, Oktober 2005. Saafroedin Bahar dengan judul *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945– 22 Agustus 1945* diterbitkan di Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1995. Lambert Giebels dengan judul *Soekarno Biografi 1901 – 1950* diterbitkan di Jakarta : Grasindo, 2001.



### 3. Tahapan Kritik

Tahapan kritik atau tahapan verifikasi yaitu pengujian untuk memperoleh keabsahan sumber data, baik keasliannya dan kashahihannya melalui kritik external dan internal. Verifikasi dilakukan melalui penelaahan terhadap sifat dan pengarang sumber, serta dilakukannya perbandingan sumber, baik melalui uji silang atau melalui kolaborasi, yaitu dengan membandingkan sumber-sumber yang bebas antara satu dengan yang lainnya.

### 4. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi atau penafsiran sumber dilakukan setelah diperoleh fakta - fakta sejarah hasil pengujian dan analisis fakta, pada tahapan ini dilakukan penafsiran dan prangkaian fakta - fakta, sehingga didapatkan suatu rangkaian data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini, maka interpretasi berdasarkan suatu sumber penulisan lainnya.

### 5. Tahapan Historiografi

Terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam historiografi diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dan penyajian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan obyek penelitian.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing – masing terdapat beberapa sub yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

**Bab pertama : Pendahuluan** yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua : Biografi Soepomo** meliputi Riwayat Hidup Soepomo, Pendidikan Soepomo, dan Karir Hidup Soepomo.

**Bab Ketiga : Pemikiran Konsepsi Kenegaraan Indonesia Pada Masa Kolonial Hindia Belanda** meliputi Konsepsi Kenegaraan Liberalisme atau Individualistik, Konsepsi Kenegaraan Islamisme dan Sosialisme-Komunisme, dan Konsepsi Kenegaraan Nasionalisme-Integralistik.

**Bab Keempat : Pemikiran Soepomo Tentang Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia** meliputi Perjalanan Pemikiran Soepomo, Pemikiran Soepomo Dalam Pembentukan Dasar Negara Integral dan Peran Soepomo Dalam Pembentukan Rumusan UUD 1945.

**Bab Lima : Penutup** meliputi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI SOEPOMO**

#### **A. Riwayat Hidup Soepomo**

Soepomo berasal dari keluarga aristokrat Solo, Kakek Soepomo dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, ketika itu menjabat sebagai Bupati Anom Sukoharjo, dan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodo, Bupati Nayaka Sragen.<sup>1</sup> Soepomo lahir di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari 1903, lahirnya Soepomo menjadi kebahagiaan orang tua Soepomo, karena bayi laki-laki sebuah impian bagi keluarga pada waktu itu.<sup>2</sup> Soepomo adalah putra pertama dari Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raden Ajeng Renak Wignyodipuro, ibu Soepomo. Soepomo sangat disayangi oleh neneknya, karena Soepomo dilahirkan di tengah-tengah keluarga neneknya, yakni Raden Tumenggung Reksowadono.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Radis Bastian, *Para Pahlawan Terhebat Pengubah Indonesia*, (Jogjakarta : Palapa, 2013), p. 89.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie Dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme* (Yogyakarta : Thafa Media, 2015), p. 1.

<sup>3</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, (Jakarta : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1980), p. 6.

Soepomo mewarisi posisi berwibawa ningrat, karena sebagai cucu Bupati di Keraton, tidak seperti pribumi lainnya. Kanjeng Raden, sapaan Soepomo kecil, karena lahir dari keluarga aristokrat Jawa mudah mengenyam pendidikan. Soepomo menyelesaikan Sekolah Dasar di *Europeesche Lagere School (ELS)*, Soepomo tamatkan di Boyolali.<sup>4</sup> Raden Tumenggung Wignyodipuro setelah kelahiran putra pertamanya, berturut-turut dikaruniai putra-putri sepuluh orang jumlahnya. Putra-putri itu adalah : Soepomo, Suharjo, Ny. Projohabsoro, R. Rara Suharti, R. Sudomo, Ny. Suleman, Ny. Ermanu, R. Rara Supadmi, R. Rara Sri Emah, R. Suroyo , dan R. Sudiro .<sup>5</sup>

Soepomo adalah putera tertua Raden Tumenggung Wignyodipuro, oleh karena itu setiap hari Soepomo mempunyai tugas untuk membimbing adik-adiknya. Soepomo harus dapat memberikan contoh dalam bertutur kata dan perbuatan pada adik-adiknya, dituntut jiwa kepemimpinan, penuh kesabaran dan kekeluargaan. Maka jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana telah subur di lubuk hati Soepomo sejak kecil.

Soepomo anak yang tidak sombong, anak keturunan ningrat yang biasanya jarang bergaul dengan pribumi, Soepomo langgar.

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 4-5.

<sup>5</sup> Soegito, *Prof Mr Dr Supomo...*, p. 7-8.

Soepomo datang dan bertanya kepada kaum pribumi, hanya untuk sebuah jawaban. Anak pribumi dari golongan miskin Soepomo temui, Soepomo bertanya kenapa mereka tidak sekolah. Soepomo mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, namun, Soepomo tetap sedih karena bukan kebahagiaan yang didapat, walaupun sudah meendapat jawaban, ternyata jawaban tersebut, melahirkan pertanyaan baru, yang lebih rumit. Pendidikan bukan untuk orang miskin, Negeri ini butuh banyak orang yang berpendidikan, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah miskin.

Berbeda dengan anak kecil lainnya, yang asik dengan suapan bubur dengan keruhnya air hujan dan meminta suapan bubur dari orang tuanya, karena Soepomo kecil sudah mulai menanggung beban. Beban pikiran yang harusnya dipanggul oleh orang dewasa. Soepomo kecil menuntaskan misi pertamanya dalam belajar, Soepomo lulus ELS Pada usia 14 tahun. Tidak lama menikmati masa bebasnya, Soepomo masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yakni *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Solo. Di sela-sela padatnya mencari ilmu di MULO, Soepomo bertemu dengan Koes Hartati.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>JAsshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 9.

Raden Ajeng Koes Hartati adalah seorang gadis keturunan bangsawan Keraton. Putrid Pangeran Ario Mataram dan Gusti Kanjeng Ratu Alit di Surakarta. Oleh karena itu gadis ini pun terikat oleh tata nilai, adat tradisi Keraton yang pada saat itu masih ditaati. Pantangan dan tabu bagi gadis Keraton masih tetap harus dijunjung tinggi.<sup>7</sup>

Upacara perkawinan Soepomo dengan Koes Hartati dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1929 dengan tata upacara adat Kraton.<sup>8</sup> Upacara adat Keraton membawa semarak dan sesuai sekali dengan keahlian temanten laki-laki, yakni sebagai Sarjana Hukum Adat. Peristiwa ini merupakan suatu permulaan dari kebahagiaan keluarga Soepomo, sebab setelah berkeluarga, karir Soepomo makin menanjak dan makin harmonis.

Soepomo diangkat sebagai Pegawai Negeri di Pengadilan Sragen, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1923 setelah selesai studi di Rechtschool. Pengadilan adalah tempat orang – orang mencari keadilan, dan Soepomo menanggung beban itu. Persoalan masyarakat Soepomo tangani, kesedihan selalu menghingapi hidupnya, karena melihat banyak persoalan yang menimpa rakyatnya.<sup>9</sup> Soepomo tidak

---

<sup>7</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 17.

<sup>8</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 18.

<sup>9</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 13.

hanya duduk di dalam kantor, Soepomo bukan tipe pejabat yang hanya menikmati suguhan teh hangat tiap pagi dan menerima gaji bulanan. Soepomo melaukan blusukan untuk mengetahui keadaan masyarakat dan menciptakan keadilan. Kegiatan itu sering Soepomo lakukan, bercengkrama dengan petani dan pengemis adalah santapannya, disinilah Soepomo mengetahui permasalahan dan mendapatkan bahan untuk menciptakan keadilan.

Watak aktivis telah tertanam dalam diri Soepomo muda. Budi Utomo organisasi yang pada tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dan anggota lebih dari 10.000 orang, menjadi tempat beraktualisasi Soepomo.<sup>10</sup> Organisasi menjadi tempat untuk melatih komunikasi politik. Selebih waktunya di Budi Utomo, Soepomo masih hanyut dalam kerjanya pada institusi Pengadilan Sragen.

Selama di Belanda, Soepomo bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI), organisasi yang diketuai oleh Hatta. Kolonialisme dan Imperialisme yang dilakukan oleh Belanda adalah kegiatan yang dikutuk oleh PI. Perhimpunan Indonesia punya cita politik yang radikal, namun garis ideologinya liberal. Dari sudut organisasi, Perhimpunan Indonesia cukup ketat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 13 – 14.

<sup>11</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 16-17.

Perhimpunan Indonesia tidak punya cabang, tetapi ada persahabatan dengan beberapa orang yang punya kesamaan pandangan politiknya. Bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, membuat Soepomo menapaki jalan gairah perlawanan Kolonialisme, jalan kemerdekaan nasional. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi para terpelajar dalam mengungkapkan manifestonya. Perhimpunan Indonesia menyatakan pernyataannya kepada bangsa Belanda pada bulan Mei 1945, sebelum dikumandangkannya proklamasi. Melalui majalah Indonesia, Perhimpunan Indonesia menyatakan status kemandirian Indonesia dengan perwakilan rakyat sendiri dan pemerintah yang bertanggung jawab kepadanya.<sup>12</sup>

Oganisatoris sebuah keahlian yang didapat hasil dari pengalaman, mengorganisir adalah kehebatan, tidak semua orang bisa. Soepomo juga pandai menari, memamerkan dan mengenalkan budaya Negeri. Soepomo menampilkan budaya Negerinya di ibu Kota Perancis.<sup>13</sup> Melihat tarian budaya Soepomo, penonton terhipnotis dengan adegannya, pentas itu bukanlah pentas sembarangan, Pejabat utusan negara–negara hadir dipentas itu. Disitu pula mereka tahu,

---

<sup>12</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 17-18.

<sup>13</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 19.



Indonesia Negeri berbudaya, pantaslah mereka merdeka, Soepomo bukanlah seniman instan, Soepomo total saat petunjuk.

Sejak dari kecil, keterampilan seni tari dan kerawitan Jawa sudah terlatih. Bakatnya diasah oleh seniman Keraton terkenal, Pangeran Sumodiningrat dalam Kridowacana. Tidak heran pagelaran seninya bagai penari profesional yang ulung. Gosip budaya Inonesia murahan, rendahan dan terbelakang, dihapuskan oleh Soepomo, membuktikan dengan langkah bukan membuktikan dengan retorika.<sup>14</sup>

Walau di Negeri orang, Soepomo tidak segan–segan terus berlatih menari dan kerawitan. Bersama teman–temannya, seperti Suropto, Mr. Sunario, Susanto Tirtoprojo, R. Purbacaraka, Mr. Wiryono Projodikoro, dan Mr. Suyudi.<sup>15</sup> Di samping ingin menghidupkan kebudayaan bangsanya juga untuk menunjukkan kepada dunia tentang keluhuran bangsanya. Sanjungan di Negeri orang tidak membuat Soepomo lupa akan tanah kelahirannya. Soepomo kembali ke Indonesia dengan bekal yang cukup, untuk membantu membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Pada tahun 1927, Soepomo diperbantukan di

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 20.

<sup>15</sup> Soegito, *Prof Mr Dr Supomo...*, p. 13.

Pengadilan Negeri Yogyakarta, Soepomo dipromosikan menjadi Ketua Luar Biasa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.<sup>16</sup>

Soepomo mempunyai hobi bermain tennis bersama isterinya, olah raga tennis merupakan kegemaran yang dilaksanakan di celah–celah kesibukannya sehari–hari. Begitu pula berkebun dan menanam bunga, jiwa seninya tetap melekat dengan menggemari keindahan pada tumbuh–tumbuhan.<sup>17</sup> Soepomo orang yang romantis, Soepomo selalu ada di mata istrinya. Soepomo tidak segan menanam bunga di halaman rumahnya bersama sang istri. Memasak juga menjadi keahlian, jadi tidak heran jika Soepomo bergantian masak dengan sang istri, ini adalah rutinitas yang Soepomo jalani setiap pagi.<sup>18</sup>

Soepomo wafat secara mendadak, tanpa menderita sakit sebelumnya. Soepomo akhirnya meninggal pada pagi hari tepat jam 07.30 tanggal 12 Desember 1958, pada hari Jum’at Kliwon di jalan Diponegoro 9, Jakarta. Semua sarana komunikasi memberitakan berita duka itu ke seluruh penjuru tanah air.<sup>19</sup> Negeri ini menangis mengiring

---

<sup>16</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 21.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 68

<sup>18</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 68.

<sup>19</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 22.

jenajahnya, merah putih yang menjulang gagah diturunkan setengah tiang, tanda Negeri ini berduka. Suara tangis terdengar dimana – mana, rakyat menangis kepergiannya, itulah tanda Negeri harus mencari pengganti untuk memperjuangkan asas bangsa, persatuan dan kekeluargaan.<sup>20</sup>

## **B. Pendidikan Soepomo**

Soepomo adalah seorang putra bangsa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Soepomo mampu memanfaatkan kesempatan berharga itu, Soepomo mempergunakan kesempatan itu secara cermat, tekun dan penuh kesadaran. Maka lahirlah Soepomo di tengah–tengah tantangan zaman sebagai seorang genius yang berkepribadian.

Soepomo bersekolah dengan anak–anak Belanda dan putra–putri kaum bangsawan di *Europeesche Lagere School* (ELS). Sebagai seorang Putra Bupati Anom tentu saja Soepomo mempunyai hak untuk bersekolah di Sekolah Dasar Belanda. Di sekolah ini Soepomo mendapat banyak pengalaman, terutama dari teman–teman satu kelas. Soepomo mulai dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dan tekun.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 68.

<sup>21</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 8-9

Selama sekolah di ELS, Soepomo selalu memperoleh nilai yang memuaskan, kawan-kawannya sudah melihat bakat yang luar biasa pada diri Soepomo. Berkat bimbingan guru–gurunya dan ketekunannya, akhirnya Soepomo dapat menamatkan sekolah pada usia yang cukup muda, yaitu 14 tahun, tepatnya pada tahun 1917 Soepomo tamat ELS di Solo dengan angka yang memuaskan.<sup>22</sup> Soepomo melanjutkan ke sekolah tingkat berikutnya yakni ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Kota Solo. Di sekolah MULO Soepomo makin menunjukkan kemampuannya, Soepomo berhasil menamatkan sekolahnya pada tahun 1920 dengan hasil yang gemilang.<sup>23</sup> Kepribadian Soepomo makin menarik perhatian kawan–kawannya, tidak sedikit teman–teman Soepomo menaruh simpati kepadanya.

Soepomo menyelesaikan pendidikan di MULO selama dua tahun (1918–1920). MULO sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon–calon pegawai negeri, dokter maupun ahli hukum. Hukum merupakan bidang yang digeluti di sekolah. Soepomo adalah seorang pencerah, penegak keadilan, pemikir hebat, filsuf, dan orang bijak yang dipunyai Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 9.

<sup>23</sup> Windy A Dkk, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20* (Yogyakarta : Narasi, 2005), p. 211.

<sup>24</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 10.

Setelah lulus dari MULO, Soepomo melanjutkan pendidikannya di *Reschtchool* (Sekolah Hukum), Jakarta (Batavia). Batavia nama Jakarta pada waktu itu, tempat para cendekia berkumpul, berorganisasi dan berdiskusi. Lingkungan Batavia merubahnya menjadi seorang aktivis, bukan hanya persoalan kampung yang Soepomo bahas, namun masalah bangsa sudah menjadi topik harian saat berbicara ataupun berdiskusi.<sup>25</sup> Setelah lulus dari MULO dan melanjutkan pendidikan di Jakarta, Soepomo benar-benar berpisah dari keluarganya dan mulai hidup di perantauan. Di kota Jakarta pemuda Soepomo mendapat pengalaman yang cukup banyak. Soepomo berkenalan dengan pemuda-pemuda lain yang kemudian menjadi pemuka-pemuka pergerakan nasional.

Soepomo yang belajar di sekolah hukum, sadar akan kebijakan kolonial, kebaikan pada pribumi merupakan topeng. Belajar hukum bukan hanya lewat teks, namun juga lewat pengalamannya bergaul dengan masyarakat miskin. Sebagai rakyat yang sengsara karena kebijakan yang bermuka topeng, eksploitasi adalah wajah imperialis sebenarnya.

---

<sup>25</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 11-12.

Soepomo melanjutkan pendidikannya di Negeri Belanda. Soepomo mendapat tugas belajar ke *Faculteit der Rechtsgeerdheit, Universitas Leiden* (12 Agustus 1924 – 15 Juli 1927) dan meraih gelar *Meester in de Rechten (Mr)* dengan predikat *Summa cum Laude*. Soepomo meraih gelar doctor ilmu hukum dengan disertasi berjudul *de Reorganisatie van het Agrarisch stelsel in het Gewest Soerakarta*.<sup>26</sup> Leiden Universitiet adalah tempatnya, kebencian terhadap imperialism Belanda disimpan terlebih dahulu. Mencuri ilmu adalah solusi, menjadi murid barat yang cerdas, menguasai ilmunya sebagai alat untuk melawannya.

Prestasi membuat Soepomo mendapat beasiswa ke Belanda, Soepomo menginjak kaki dan mengasah ilmu di Negeri penjajah pada umur 21 tahun. Di Negeri penjajah tidak menyurutkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah segalanya, berjuang tanpa ilmu tidaklah cukup, merawat dan selalu mengasah adalah kewajiban. Bangsa Hindia Belanda (Indonesia) adalah bangsa yang diremehkan dan dikucilkan oleh Belanda. Soepomo terlecut untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cerdas dan bangsa pekerja keras.

---

<sup>26</sup>Windy, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20...*, p. 211.

Semua mahasiswa Leiden terbangong mendengar Soepomo mendapat nilai bagus.<sup>27</sup>

Cornelis van Vollenhoven adalah guru Soepomo di Belanda, guru yang ikut mengasah pemikiran hukumnya. Hukum adat adalah keahliannya, sebagai murid Cornelis van Vollenhoven, Soepomo mewarisi tahta ilmunya. Belanda tidak hanya sebagai tempat meraih gelar, namun juga sebagai tempat mengasah ilmu. Soepomo adalah Professor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum Internasional. Tesis doktornya yang berjudul “*Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*” (Reorganisasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, namun juga secara tajam menganalisis hukum–hukum kolonial yang berkaitan dengan pertahanan di wilayah Surakarta.<sup>28</sup>

Soepomo adalah juga anggota Budi Utomo, kemudian meneruskan keanggotaanya dalam Parindra (Partai Indonesia Raya, fusi antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, 1935). Kemudian dilanjutkan dengan menjadi anggota dan pengurus partai Parta

---

<sup>27</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 15 - 16.

<sup>28</sup> Bastian, *Para Pahlawan Terhebat Pengubah Indonesia...*, p. 89.

Persatuan Indonesia Raya (PIR) sampai tahun 1957.<sup>29</sup> Soepomo juga mendirikan Yayasan Dharma yang menerbitkan majalah Mimbar Indonesia. Bersama Pangeran Moh. Noor dan Soekardjo Wirjopranoto, sekaligus menjadi anggota redaksi majalah tersebut.<sup>30</sup> Soepomo dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas dan aktif. Sejak sekolah hukum, Soepomo sudah aktif di organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

Soepomo termasuk pemuda yang memprakarsai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun tersebut Soepomo bersama Ali Sastromidjojo menulis brosur tentang perempuan Indonesia dalam persoalan Hukum. Tulisan tersebut Sebagai sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya kongres perempuan Indonesia.<sup>31</sup>

### **C. Karir Soepomo**

Soepomo mempunyai karir yang cukup baik semasa hidupnya. Soepomo terkenal sebagai seorang tokoh Budi Utomo dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Pemuda Soepomo bukan tergolong orang yang pasif atau apatis dalam pergerakan nasional. Perkenalannya

---

<sup>29</sup> Marsilam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945...*, p.242.

<sup>30</sup> Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945...*, p. 243-244.

<sup>31</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap* (Jakarta : Penebar Swadaya Grop, 2013), p. 42.



dengan Dr. Soetomo pada sekitar tahun 1922, Soepomo lebih aktif lagi sehingga menjelang tahun 1930 Soepomo menjadi tokoh yang berpengaruh dalam Budi Utomo.<sup>32</sup>

Soepomo dikirim tugas belajar di Negeri Belanda. Soepomo datang ke Negeri Belanda bertepatan dengan makin meningkatnya suhu politik di kalangan para pejuang Perhimpunan Indonesia. Sebagai seorang nasionalis, Soepomo tertarik dengan perjuangan Mahasiswa di Belanda. Soepomo menggabungkan diri dan terjun kemedan perjuangan bersama kawan–kawan Perhimpunan Indonesia.<sup>33</sup>

Soepomo bertarung dengan waktu, bekerja di birokrasi hukum membuatnya menumpahkan puluhan tahun pengalamannya. Menjadi Menteri Kehakiman membuatnya mengingat bagaimana saat diperbantukan di Pengadilan Negeri Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1923.<sup>34</sup> Setelah lulus dari kuliah, Soepomo langsung bergabung dalam profesi hakim pada tanggal 30 September 1927 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.<sup>35</sup> Karir Soepomo dalam ilmu hukum tidak diragukan lagi, Soepomo menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo pada tanggal 13 Desember 1932–10 Agustus 1938.

---

<sup>32</sup>Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 25.

<sup>33</sup>Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 27.

<sup>34</sup>Windy, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20...*, p. 211.

<sup>35</sup>Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 21.

Pengalamanya dalam dunia praktisi membuat *Recht Hoge School* di Jakarta merekrutnya menjadi Dosen.

Soepomo melaksanakan tugas awalnya sebagai guru pada tanggal 1 Juli 1939.<sup>36</sup> Sebelum menjadi guru, keahlian dan totalitas Soepomo sudah terdengar kemana–mana. Pemerintah Belanda, kemudian menunjuk Soepomo menjadi anggota komisi Visman.<sup>37</sup> Tidak sembarang orang yang ditunjuk, karena terkait dengan sistem ketatanegaraan, dan Soepomo adalah ahli dalam bidangnya.

Pemerintah Jepang juga mendengar kehebatan Soepomo dalam bidang hukum. Saat Jepang menduduki Indonesia, Kantor perundang–undangan, diberikan kepada Soepomo sebagai kepala.<sup>38</sup> Soepomo selalu menduduki berbagai jabatan pada masa hidupnya, bukan karena kedekatannya dengan penguasa, namun keahliannya-lah yang menggiring nasibnya. Jabatan hanyalah alat untuk melindungi rakyatnya melalui selimut putusan atau kebijakan yang melibatkannya. Begitulah Soepomo hidup, ajaran–ajaran leluhur dijadikan pedoman hidupnya.

---

<sup>36</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 15 – 16.

<sup>37</sup> Komisi Visman adalah Komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan – perubahan ketatanegaraan. Komisi ini bertugas untuk mengumpulkan bahan – bahan apa yang di inginkan oleh bangsa Indonesia. Disebut Visman, karena dalam komisi ini diketuai oleh Dr. F.H. Visman.

<sup>38</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 24 – 25.

Setelah proklamasi, Soepomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman Pertama Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 – 14 November 1945.<sup>39</sup> Menteri Kehakiman adalah jabatan yang harus diurusnya dalam masalah hukum. banyak lembaga yang melibatkan dirinya, baik sebagai penasehat ataupun sebagai pejabat.

Belanda menampakan kembali di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1945, disusul dengan sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philips Christison di Jakarta. Mengakibatkan gejolak politik di tanah air, gempuran meriam dan letusan senapan terdengar dimana–mana. Belanda melancarkan konsepsi Van Mook dengan pembentukan Negara–Negara boneka. Negara kesatuan Republik Indonesia terancam oleh politik *dive-de et impera* yang dijalankan oleh Belanda. Hal ini melahirkan perjuangan fisik (militer) untuk melawan taktik dan politik Belanda, juga melahirkan perjuangan diplomasi dalam kerangka memperjuangkan pengakuan *de facto* dan *de jure* Negara Republik Indonesia.

Tidak ingin ada pertumpahan darah, Soepomo berdiri digarda terdepan untuk melakukan prundingan atau diplomasi. Soepomo sejak awal aktif berjuang dalam bidang diplomatik, sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan–perundingan dengan Belanda.

---

<sup>39</sup>Windy, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20...*, p. 212.

Soepomo ditunjuk sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Dalam perundingan–perundingan dengan Komisi Tiga Negara dan Belanda, Soepomo ditunjuk sebagai anggota dan penasehat ahli bersama dengan Juanda. Dalam perundingan antara delegasi Belanda dengan delegasi Republik Indonesia di bawah naungan UNCI (United Nations Commission For Indonesia) pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta.<sup>40</sup>

Soepomo juga mengambil peranan aktif dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag. Berdasarkan hasil perundingan, kedaulatan atas Indonesia, kecuali Irian Barat diserahkan sepenuhnya oleh Belanda. Dan akan diserahkan selambat–lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.<sup>41</sup>

Menerjemahkan administrasi keadilan inilah yang dilakukan Soepomo. Itulah tugas sesungguhnya yang diemban oleh seorang Menteri Kehakiman, tanpa perumusan regulasi dan kebijakan yang baik, maka tata organisasi keadilan tidak mampu menjawab aspirasi keadilan rakyat. Dalam menerjemahkan administrasi keadilan,

---

<sup>40</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 36.

<sup>41</sup> Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 36.

Soepomo menggali konteks sosio-historis.<sup>42</sup> Kehebatan pada birokrasi bidang hukum cukup terlatih, karena berbagai pengalaman yang Soepomo tempuh. Tidak heran, saat Soepomo menjabat menjadi Menteri Kehakiman pertama di Indonesia, Soepomo sudah mengerti tugas, pokok, fungsi dan kewenangan organisasinya.<sup>43</sup>

Menjabat Menteri Kehakiman pertama dalam waktu singkat, tidak lantas membuat Soepomo lepas dari kerja reformasi hukum. Soepomo tetap dipercaya oleh Republik Indonesia yang baru saja merdeka, untuk tetap menjadi penasihat Menteri Kehakiman. Soepomo digantikan oleh Soewandi, Pemikiran-pemikiran Soepomo masih dibutuhkan dalam transplantasi dan difusi hukum di Indonesia di masa perang.<sup>44</sup>

Setelah Soepomo menjabat sebagai penasihat Menteri Kehakiman, Soepomo sibuk dengan delegasi perjanjian Renville, Roem Royen, dan Meja Bundar. Setelah Konferensi Meja Bundar, Soepomo kembali didapuk menjadi Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Desember 1949 Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada titik inilah

---

<sup>42</sup>Pengertian sosio – historis adalah kehidupan sosial yang berhubungan dengan sejarah kehidupan.

<sup>43</sup>Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 46 – 47.

<sup>44</sup>Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 47.

Soepomo kembali ikut menyusun Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersumber dari hasil Konferensi Meja Bundar.<sup>45</sup>

Peranan Soepomo sebagai Menteri Kehakiman dalam rangka memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia besar sekali. Sebab perubahan dari Negara Serikat ke bentuk Negara Kesatuan ditempuh dengan cara konstitusional. Perjuangan Soepomo yang gigih untuk memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan.

Soepomo memimpin perguruan tinggi Universitas Indonesia (UI) Tahun 1951 – 1954. Memimpin sebuah perguruan tinggi bukanlah hal yang teknis, melainkan mengatur irama keilmuan, kebebasan akademik, dan pengembangan sains. Pemimpin Universitas punya andil besar dalam memperkuat kebutuhan profesi dan pembangunan.<sup>46</sup> Soepomo meneruskan jejak langkah R.M Pandji Soerachman, Soepomo tampil secara progresif dalam menafsirkan peraturan perguruan tinggi untuk kebutuhan bangsanya. Soepomo melihat bahwa, di dunia pendidikan ini, bangsa Indonesia, karena penjajahan sudah barang tentu tertinggal. Jauh ketimbang negara–negara barat.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 49 – 50.

<sup>46</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 52.

<sup>47</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 54.

Soepomo menjabat menjadi Presiden Universitas Indonesia menyadari dengan sepenuh hati, bahwa kemerdekaan dari dunia pendidikan adalah sebuah perjuangan. Soepomo menyaksikan bahwa jumlah dari Guru Besar pada universitas Indonesia sebanyak 107 pada tahun 1951. Diantaranya banyak 26 orang saja atau 24.3% saja yang berasal dari orang Indonesia. Sementara selebihnya, yakni 81 orang atau 75.7% berasal dari bangsa asing.<sup>48</sup>

Dominasi bangsa asing menunjukkan sebuah kelas sosial dalam jantung peradaban sebuah bangsa. Institusi pendidikan belum merdeka seratus persen dari pengetahuan kebarat–baratan. Belum lagi kedaulatan bahasa. Bahasa Indonesia tersisihkan dari percaturan pengetahuan, jika para pengajar masih tetap mempertahankan formasi orang asing yang dominan.

Soepomo mempunyai idealisme dan semangat juang. Kampus yang ternama dan berpengaruh ini, kelak akan mampu mengabdikan karyanya pada bangsa Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pengajar muda, stok mahasiswa pun meningkat dengan tajam dibawah kepemimpinan Soepomo. Lonjakan minat warga dalam menempuh pendidikan tinggi pun seiring dengan pengembangan tradisi pengetahuan keilmuan.

---

<sup>48</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 55.

Soepomo terus mengkampanyekan ide-ide ketimuran dalam resonansi yang fleksibel berkarakter. Pada sidang Persirikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Soepomo tidak tampil ciut, diantara negara-negara besar yang lain. Terhitung dua kali, Soepomo mengikuti sidang PBB, yakni pada tanggal 13 November 1950 di Lake Success dan pada tanggal 5 November 1951 di Paris.<sup>49</sup>

Karir Soepomo terakhir menjabat sebagai Duta besar Indonesia di Inggris, Soepomo cukup memahami peran dari penyambung aspirasi bangsanya di Negeri orang. Menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di Kota London Tahun 1954 – 1956, mengakhiri perjuangannya dalam pentas pemerintahan, namun tidak untuk tugas mendidik dan mengkader bangsa. Soepomo tetap mengajar, karena sejatinya Soepomo adalah guru.<sup>50</sup> Soepomo patut disebut sebagai Maha guru, tujuh gelar Guru Besar pernah tersamatkan kepadanya, tidak pernah ada yang menandinginya dalam hal ini. Soepomo memberikan pelajaran bagi anak ibu pertiwi, mengabdikan pada Negara tidak ada batas waktunya, Soepomo laksanakan dengan penuh cinta.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Soegito, *Prof Mr Dr R Supomo...*, p. 40.

<sup>50</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 67.

<sup>51</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 67 – 68.



**BAB III**  
**PEMIKIRAN KONSEPSI KENEGARAAN INDONESIA**  
**PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA**

**A. Konsepsi Kenegaraan Liberalisme atau Individualistik**

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilik individu. Liberalisme meletakkan manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia dalam perspektif liberalisme sebagai pribadi yang utuh dan lengkap yang terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan* (Jakarta : Kencana, 2016), p. 9.

Makna kebebasan sebagaimana yang dipahami oleh kaum liberal dalam dunia modern hingga masa kini, semua perbedaan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak pribadi, semua protes terhadap penghisapan dan penindasan, terhadap pelanggaran otoritas publik, atau pembiusan massa oleh kebiasaan atau propoganda yang terorganisir, bersumber dari konsepsi manusia individualistik.<sup>2</sup> Para pemikir liberal menegaskan bahwa jika kebebasan mengandung suatu batas kekuasaan setiap orang untuk memaksa saya melakukan apa yang tidak, atau mungkin tidak, ingin saya lakukan, maka, apa pun ideal yang karenanya saya dikekang, saya tidaklah bebas.<sup>3</sup>

Indonesia sudah mulai memasuki konsep kenegaraan liberal ketika Belanda menguasai sistem pemerintahan di Indonesia, yang akhirnya menjadi Pemerintahan Hindia Belanda. Baik melalui sistem politik, sosial, dan ekonomi. Masalah-masalah ekonomi Indonesia pada masa kolonial mengarahkan dalam kepentingan negara Belanda. Pertumbuhan ekonomi dan masalah kesejahteraan penduduk pribumi hanya berkaitan dalam proyek-proyek insfrastruktur.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan* (Jakarta : LP3ES, 2004), p. 239.

<sup>3</sup> Berlin, *Empat Esai Kebebasan...*, p. 290.

<sup>4</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2008), p. 334.

Orang-orang di Barat memposisikan hidupnya sebagai orang yang terasing dalam pergaulan. Jadi mereka menganggap bahwa mereka bisa hidup dengan hanya usahanya sendiri tidak tergantung dengan orang lain, dengan pandangan seperti itu, akhirnya mereka berusaha untuk menggunakan sifat individualnya. Masyarakat yang mempunyai sifat individual cenderung bekerja hanya untuk dirinya sendiri bukan didasari untuk niatan sosial. Untuk bisa menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang berfaham individualism, maka negara harus lebih kuat daripada masyarakatnya.<sup>5</sup>

Pada permulaan abad ke-20 dimulailah dengan istilah liberalisme modern,<sup>6</sup> kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaan memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan politik etis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie Dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Pemikiran Hukum adat, dan Konstitusionalisme* (Yogyakarta : Thafa Media, 2015), p. 216.

<sup>6</sup> Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia : Politik Pemikiran Bung Hatta* (Jakarta : Kompas, 2010), P. 93.

<sup>7</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p. 327.

Kebijakan politik etis terdapat lebih banyak janji daripada pelaksanaan, dan fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah. Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Semua ini berlangsung dalam suatu lingkungan ekonomi yang sedang berubah dengan cepat. Aksi-aksi penaklukannya di daerah-daerah luar Jawa telah memperluas wilayah kekuasaan Belanda, dan daerah-daerah tersebut menjadi fokus yang lebih penting daripada Jawa dalam pembangunan ekonomi baru.<sup>8</sup>

Zaman liberalis dari abad ke-20 banyaknya modal yang ditanam dalam perusahaan-perusahaan, modal kolonial terpaksa mengambil tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam perekonomian Indonesia. Pabrik-pabrik gula, karet serta pembuatan pelabuhan-pelabuhan, kereta api dan bengkel-bengkel yang membutuhkan tenaga kerja penduduk. Alat-alat pemerintahan yang semakin meluas dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan partikular membutuhkan lapisan rakyat yang mempunyai kecerdasan otak dan cakap menjabat pekerjaan-pekerjaan yang serba modern. Walaupun kaum liberalis berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan

---

<sup>8</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* ..., p. 328-329.

kekuatan-kekuatan yang berbau feodal di desa, pengaruh kapitalisme masih dapat juga menerobosnya.<sup>9</sup>

Selama zaman liberal di Indonesia, kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial yang standar hidupnya perlu ditingkatkan. Modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksplotasi bahan-bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern pun terasa. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan bisnis mendukung keterlibatan yang semakin intensif dari jajahan dalam rangka mencapai ketentraman, keadilan, modernitas, dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Arus-arus pemikiran abad ke-20 tentu saja tetap terus bertahan hingga sekarang ini, terutama di Amerika dan negara-negara Persemakmuran Inggris. Karena gagasan dianggap sebagai sumber dari banyak kekacauan, terdapat kecenderungan untuk menekan konflik antara klaim-klaim liberal akan hak-hak politik individu dan ketidakadilan ekonomi yang dapat diakibatkan oleh pemuasan mereka yang

---

<sup>9</sup> S. J. Rutgers, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Yogyakarta : Ombak, 2012), p. 1.

<sup>10</sup> Rikclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p. 328.

merupakan inti dari kritik sosialis dengan memasukan keduanya dalam suatu rezim otoriter yang menghilangkan wilayah bebas di mana konflik seperti itu dapat terjadi. Apa yang sungguh-sungguh khas menceritakan bangsa Indonesia adalah suatu konsep baru tentang masyarakat, yang nilai-nilainya dapat dianalisis bukan berdasarkan hasrat atau pengertian moral yang mengilhami pandangan tentang tujuan-tujuan akhir yang diyakini oleh sebuah kelompok atau seorang individu, melainkan berdasarkan suatu hipotesis faktual atau dogma metafisik tentang sejarah, atau ras, atau watak nasional yang dengannya jawaban-jawaban dari pertanyaan apa yang baik, benar, diperlukan, diinginkan, dan tepat dapat dideduksikan secara ilmiah.<sup>11</sup>

Harapan kaum liberal mengenai pembangunan ekonomi negeri itu melalui perusahaan hanya mewujudkan sebagian. Perusahaan swasta menghasilkan kekayaan besar, tapi keuntungan terutama masuk kantong pengusaha, bukan pekerja. Pada awal abad ke-20 muncul suatu prinsip bahwa Indonesia harus diperintah, bukan demi Belanda, tapi demi penduduk aslinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Berlin, *Empat Esai Kebebasan ...*, p. 114-115.

<sup>12</sup> Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara : Sejarah Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), p. 382.

## **B. Konsepsi Kenegaraan Islamisme dan Sosialisme-Komunisme**

Islamisme adalah ideologi keagamaan pada prinsipnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain. Ideologi Islam tidak memisahkan antara wilayah kehidupan dunia dan akhirat, antara politik dan ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama tidak terpisah. Melainkan terintegrasi. Cita-cita moral sangatlah menonjol dalam mewujudkan tata kehidupan sosial politik yang seimbang, tidak saja dalam soal ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan dimensi dunia akhirat.<sup>13</sup>

Membicarakan Islam dalam soal bentuk negara sulit dihindari, bagaimanapun Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, eksistensinya tetap menjadi dominan utama dalam membicarakan ideologi kebangsaan, kendati dalam bagian lain terdapat kelompok ideologis lain yang berasal dari berbagai aliran yang bercampur dalam apa yang kita kenal dengan ideologi kebangsaan atau kadang-kadang disebut sebagai kubu sekuler. Bagi para pejuangnya, Islam dianggap sebagai ideologi yang dapat memecahkan sejumlah persoalan kemanusiaan, menjamin suatu keadilan sosial yang luas, dan membuka kesempatan yang adil dalam rangka memperoleh

---

<sup>13</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 11.

kesejahteraan ekonomi, persamaan di hadapan hukum, karena itu, Islam tidak bisa disamakan dengan banyak paham atau ideologi lainnya.<sup>14</sup>

Kebangkitan Islam telah menjadi cita-cita umum untuk jutaan Muslim. Bahkan sebagian besar kelompok etnik Indonesia dengan kuat berpegang pada prinsip Islam, meskipun banyak dari mereka tidak pernah menyesuaikan adat istiadat dan cara hidup mereka dengan aturan ketat Al-qur'an. Mereka menemukan bahwa Islam adalah seruan pemersatu yang sangat bagus untuk melawan pengaruh asing. Dalam arti tertentu organisasi-organisasi Islam berawal dari reaksi terhadap berbagai pengaruh asing.<sup>15</sup>

Kekuatan politik Islam telah muncul pada awal 1900-an, bahkan menurut beberapa dokumen jauh lebih dahulu dari kemunculan kekuatan-kekuatan nasionalis. Pada tahun 1905, pengorganisasian kekuatan Islam dilakukan oleh sejumlah saudagar Islam dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) dapat dipandang sebagai embrio bagi kemunculan kekuatan-kekuatan Islam setelahnya, bahkan kemunculan SDI telah menginspirasi kalangan kebangsaan untuk mendirikan perkumpulan di kalangan mereka sebagai manifestasi dari

---

<sup>14</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, P. 23-24.

<sup>15</sup> Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, p. 392-393.



panggilan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pribumi.<sup>16</sup>

Pada tahun 1912, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Organisasi Sarekat Islam dipimpin oleh Tjokroaminoto. SI menyatakan setia kepada Pemerintah Belanda, tetapi ketika organisasi tersebut berkembang di desa-desa, maka meletuslah tindak kekerasan.<sup>17</sup> Lahirnya SI merupakan respons kalangan Islam terhadap praktik politik pemerintah kolonial Belanda yang juga menyebarkan agama resmi pemerintah mereka kepada penduduk Indonesia. Elit-elit SI memandang bahwa Pemerintah Belanda telah memperlakukan penduduk pribumi sebagai sapi perahannya, Tjokroaminoto misalnya mengatakan bahwa;

*“tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri”.*<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, p. 57.

<sup>17</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, p. 359-360.

<sup>18</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, p. 58-59.

Organisasi Islam modernis yang paling penting di Indonesia juga berdiri Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan dan pada program dakwah guna melawan agama Kristen dan takhayul-takhayul lokal.<sup>19</sup> Para ulama Syafe'i di Jawa sudah cukup makan garam. Mereka membenci modernisme yang mereka samakan dengan Wahhabisme (suatu gerakan pemurnian yang hanya mengakui kewenangan mazhab Hanbali). Oleh karena itu, pada tahun 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama (NU), kebangkitan para ulama untuk membela kepentingan kaum muslim tradisional.<sup>20</sup>

Dalam rangka menyatukan kekuatan umat, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Sarekat Islam (SI), mendirikan federasi politik umat Islam yang diberi nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dengan tujuan utama untuk mempererat persatuan kaum muslimin di dunia, dan khususnya Indonesia. MIAI didirikan di Surabaya pada 21 September 1937.<sup>21</sup> Pada sisi lain, kekuatan Islam muncul hampir bersamaan dengan lahir MIAI yakni Partai Islam Indonesia (PII) yang dipimpin oleh Sukiman berdiri pada 1937,

---

<sup>19</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* ..., P. 368.

<sup>20</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* ..., P. 382.

<sup>21</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*...,p. 67.

beberapa gerakan Islam pun mendukung partai ini seperti datang dari Muhamadiyah, Persis, Thawalib, dan bekas anggota Permi di Sumatra. PII memiliki hubungan yang dekat dengan Muhamadiyah, kedekatan itu berkaitan erat dengan keterlibatan kader-kadernya dalam PII, selain Mas Mansur, terdapat Farid Ma'ruf, Kahar Muzakkir, dan lainnya.<sup>22</sup>

Sementara MIAI yang merupakan federasi Islam pada dasarnya bergerak pada kawasan sosial dan keagamaan, tetapi dalam perkembangannya terutama menjelang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, kiprahnya meluas ke bidang politik. Setelah Jepang masuk dan menguasai Indonesia, federasi MIAI mengembangkan kerja sosial yang mencakup pembinaan umat Islam. MIAI menekankan pada persatuan anak negeri, juga mengembangkan program yang bersifat sosial, kemanusiaan dan nasionalisme.<sup>23</sup>

Pemerintah Jepang membubarkan MIAI Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang juga membentuk organisasi baru untuk mengendalikan Islam. MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang mempunyai cabang-cabangnya di setiap keresidenan di Jawa.<sup>24</sup> Setelah memperoleh status hukum baru dari pemerintahan Dai Nippon, ormas Islam dapat

---

<sup>22</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 69.

<sup>23</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 70-71.

<sup>24</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, P. 435-436.

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, membangun kembali komunikasi dengan cabang-cabang yang telah terhenti. Langkah yang penting segera dilakukan konsolidasi dan penataan kembali organisasi yang sudah rusak. Ormas Islam segera menyesuaikan tujuan gerakannya dengan kebijakan politik Jepang, meski dukungan itu bersifat simbolik belaka.<sup>25</sup>

Gagasan yang dibangun oleh kaum marxis adalah gagasan utopia, karena yang diimpikannya sesuatu yang sulit menjadi kenyataan, hingga Marx, Lenin dan pengikutnya tiada, gagasan tersebut masih tetap saja berhenti pada level gagasan. Pikiran-pikiran atau ideologi utopia tersebut tetap diperjuangkan oleh sekelompok individu pada paruh awal kemerdekaan Indonesia. Periode-periode awal Indonesia merupakan periode yang penuh dengan pertarungan ideologi antara berbagai faksi yang eksis dalam masyarakat, baik sosial, ekonomi, suku, etnik, politik dan agama, termasuk mereka yang mengusung ideologi sosialisme, marxisme, dan komunisme.<sup>26</sup>

Lahirnya komunisme di Indonesia tidak lepas dari organisasi Islam, karena PKI lahir dari perkumpulan organisasi Islam yang pada saat itu adalah Sarekat Islam (SI). Tokoh utama dari komunisme ini

---

<sup>25</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 75-76.

<sup>26</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 37.

adalah Karl Marx dan Lenin yang mendirikan Partai Bolshevik di Rusia. Secara substansi, ideologi komunis bercita-cita menghapus kelas-kelas di masyarakat, perjuangan kelas dan negara menjadi sasaran antara untuk mencapai cita-cita terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Secara umum, pemikiran komunis diwarnai oleh penilaian negatif terhadap kondisi sosiopolitik masyarakat. Berbagai langkah dan gerakan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita politiknya termasuk dengan cara kekerasan. Sistem pemerintahannya berbentuk otoriter, totaliter, atau diktator.<sup>27</sup>

Apa yang dituntut oleh Lenin adalah kekuasaan yang tak terbatas bagi sekumpulan kecil orang-orang revolusioner profesional, yang dididik semata-mata demi satu tujuan, dan yang terus-menerus mengejar tujuan tersebut dengan menggunakan semua sarana yang mereka kuasai. Oleh karena itu, tugas terpenting seorang revolusioner adalah mengubah situasi objektif tersebut, yakni mempersiapkan suatu kelas untuk melakukan tugas historisnya dalam menumbangkan kelas-kelas yang sekarang berkuasa.<sup>28</sup>

Pada tahun 1913, H.J.F.M. Sneevliet tiba di Indonesia. Sneevliet memulai karirnya sebagai penganut mistik Katolik tetapi

---

<sup>27</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, p. 10.

<sup>28</sup> Berlin, *Empat Esai Kebebasan ...*, p. 96-97.

kemudian beralih ke ide-ide sosial-demokrat yang revolusioner dan aktivisme serikat buruh. Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), ikatan sosial-demokrat Hindia, di Surabaya. Partai kecil beraliran kiri ini dengan cepat akan menjadi Partai Komunis Indonesia. Anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh basis di kalangan rakyat Indonesia.<sup>29</sup>

Orang-orang komunis, seperti dikatakan oleh *Manifestasi Komunis*, “Dengan terus terang menyatakan bahwa tujuan mereka hanya dapat tercapai dengan merombak segala kondisi-kondisi sosial yang ada dengan jalan kekerasan”. Ini adalah salah satu dari prinsip-prinsip yang menentukan dari Marxisme-Leninisme.<sup>30</sup> Revolusi komunis, terutama dalam geloranya yang pertama, menyingkapkan perbedaan kelas, jenis kelamin, atau kebangsaan. Kemudian membuka satu dunia baru yang penuh kesempatan bagi orang-orang yang selama ini didiskriminasi dari setiap kesempatan.<sup>31</sup>

Pada 25 Desember 1920, PKI memutuskan bergabung dengan Komintern-Komunis Internasional di Moskow. Taktik yang disarankan untuk partai komunis lokal adalah memperlemah pengaruh pemimpin-

---

<sup>29</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, p. 370.

<sup>30</sup> William Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme* (Yogyakarta: Narasi, 2004), p. 18-19.

<sup>31</sup> Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme ...*, p. 83.

pemimpin Sarekat Islam dan membawa seluruh organisasi itu pelan-pelan lewat infiltrasi ke dalam payung komunis. Kalangan komunis mengabdikan energi dan intelegensi mereka yang sangat luarbiasa untuk mencapai tujuan itu. Pada 1921 mereka tampaknya telah berhasil memojokan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ke dalam posisi putus asa.<sup>32</sup>

Kaum komunis menamakan keharusan-keharusan demokrasi – kemerdekaan berbicara, pers, berkumpul, persamaan menurut hukum, dan hak-hak kemerdekaan demokratis pokok lainnya sebagai demokrasi formal. Dalam konsepsi kenegaraan komunis ini, kemerdekaan-kemerdekaan demokratis yang tradisional mendapat arti baru. Kemerdekaan pers dan kemerdekaan berbicara, tentu saja, asal surat-surat kabar berfungsi sesuai dengan kepentingan mereka yang membanting tulang, dan Kemerdekaan berbicara sepenuhnya dan tidak dibatasi, asal saja ucapan-ucapan yang berbicara membantu cita-cita komunis.<sup>33</sup>

Propoganda PKI kini menunjukkan bahwa partai ini telah benar-benar meng-Indonesia. PKI kurang menekankan doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, melainkan lebih banyak berbicara dengan bahasa yang

---

<sup>32</sup> Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia...*, p. 401-402.

<sup>33</sup> Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme...*, p. 163-164.

menarik bagi rakyat Indonesia, Khususnya kaum abangan (Kaum muslim nominal) Jawa. Masyarakat tanpa kelas dikemukakan sebagai penjelmaan kembali dari negara Majapahit yang diromantiskan, yang dipandang sebagai zaman persamaan derajat yang mulia sebelum datangnya Belanda. Ramalan-ramalan yang bersifat mesianistis mengenai Ratu Adil juga dimanfaatkan sebagai daya tarik PKI.<sup>34</sup>

Kelemahan pokok komunisme adalah perbedaan di antara cita-cita dan kenyataan. Para pemimpinnya mengemukakan cita-cita yang membubung tinggi untuk pembaharuan kembali umat manusia, tetapi menggunakan cara-cara di luar peri kemanusiann. Komunisme mengatakan akan membangun satu ikatan cinta dan persaudaraan baru dengan cambuk dan kamp-kamp kerja paksa.<sup>35</sup>

### **C. Konsepsi Kenegaraan Nasionalisme-Integralistik**

Konsepsi kenegaraan integralistik lebih menekankan soal disiplin dan kepatuhan daripada kebebasan dan spontalitas dalam hubungan-hubungan kemanusiaan (pendidikan, seks, keluarga, keamanan, indrusti, pemerintahan). Anak-anak senang akan perasaan bahwa mereka dapat perlindungan dan rasa aman di bawah kekuasaan dan otoritas orangtua mereka. Keluarga lebih banyak mencerminkan

---

<sup>34</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, p. 376.

<sup>35</sup> Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme...*, p. 95-96.



tujuan-tujuan dan nilai-nilai sosial yang paling berpengaruh bagi si anak. Pencerminan dari keadaan kultural dan kejiwaan masyarakat seluruhnya.<sup>36</sup>

Sikap pribadi yang demokratis terhadap pemimpin berbeda sekali dari sikap pribadi otoriter. Sikap pribadi otoriter memandang pemimpin bangsa dengan perasaan setia campur hormat. Seperti emosi yang pertama-tama dirasakan terhadap orangtua, terutama bapaknya. Cara yang tradisional untuk menyebut seorang kepala negara bapak tanah air adalah suatu ucapan bahasa yang mempunyai hubungan kejiwaan yang mendalam. Pribadi otoriter berpikir dalam rangka kesetiaan kepada orang tertentu.<sup>37</sup>

Peningkatan jumlah kalangan terdidik yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga dekade 1920-an, membawa implikasi bagi tumbuhnya pergerakan nasional kebangsaan, diawali dengan pengorganisasian kalangan mahasiswa di Negeri Belanda, pada tahun 1908 melalui *Indishche Vereeniging*, pada tahun yang sama di Tanah Air muncul pergerakan Boedi Oetomo, suatu pergerakan nasional yang diprakarsai oleh kalangan Priyai Jawa. Kekuatan nasionalis muncul pada tahun-tahun berikutnya dengan dukungan kalangan terpelajar,

---

<sup>36</sup> William, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme...*, p. 119-120.

<sup>37</sup> Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme...*, p. 119-200.

baik mereka yang menempuh pendidikan tinggi di Negeri Belanda maupun kalangan terpelajar pribumi.<sup>38</sup>

Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908, pada dasarnya tetap merupakan suatu organisasi priayi Jawa. Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura, dengan demikian mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau itu dan mencakup masyarakat Sunda dan Madura yang kebudayaannya berkaitan erat dengan Jawa. Boedi Oetomo pada dasarnya juga merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan.<sup>39</sup>

Pada masa sesudah sekitar tahun 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elit terpelajar, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Organisasi baru ini meliputi Tri Koro Dharmo (1915) yang di tahun 1918 menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, Jong Sumatranen Bond, Perserikatan Pemuda Sumatera (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa, Perserikatan Mahasiswa Minahasa (1918), dan Jong Ambon, Pemuda Ambon (1918), dan masih banyak kelompok lainnya. Tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi,

---

<sup>38</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, p. 77.

<sup>39</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, p. 355-356.

tetapi juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung.<sup>40</sup>

Untuk menyebarkan spirit kebangkitan nasional, Boedi Oetomo menggunakan lembaga pendidikan sebagai sarana pencerahan, juga disebut sebagai laboratorium bagi calon intelegensia, melalui sekolah ini juga, terjadi pertukaran guru antara kalangan nasionalis dan kalangan Islam untuk mengajar ilmu-ilmu yang mereka kuasai kepada sekolah-sekolah Islam dan pelajaran Islam pada sekolah umum. Sebagian anggota Muhammadiyah juga menjadi anggota Boedi Oetomo, afiliasi Boedi Oetomo dengan gerakan-gerakan Islam berlangsung hingga tahun 1920-an.<sup>41</sup>

Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir bersamaan dengan meningkatnya jumlah kalangan terdidik pribumi, baik peningkatan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Negeri Belanda maupun luasnya akses kalangan pribumi untuk menempuh pendidikan pada sekolah-sekolah Belanda. Kendati PNI memiliki masalah-masalah internal dengan muncul faksi-faksi politik yang memiliki agenda masing-masing yang hendak mereka perjuangkan. Pada awal tahun 1930-an, PNI bubar sebagai akibat dari persoalan internal yang sulit

---

<sup>40</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 ...*, p. 362.

<sup>41</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan....*,p. 79-80.

diselesaikan, khususnya faksi-faksi yang bersaing yakni faksi yang mendukung sikap PNI harus kooperatif dan faksi yang nonkooperatif.<sup>42</sup>

Berdasarkan keputusan pemerintah, PNI dibubarkan. Implikasi lebih lanjutnya adalah pecahnya kekuatan kaum nasionalis kebangsaan, Sartono dan kawan-kawan mendirikan Partai Indonesia (Partindo) pada 1 Mei 1931, oleh sementara kalangan Partindo dianggap sebagai PNI dengan nama lain. Kemudian berdiri Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) Baru yang diprakasai Moehammad Hatta dengan memfokuskan perhatian pada pendidikan para pemimpin untuk gerakan nasionalis. Antara Partindo dan PNI Baru memiliki visi yang berbeda, PNI Baru menghendaki kebangsaan rakyat dan kedaulatan rakyat, Partindo tetap meneruskan pola pergerakan sebagaimana dalam PNI.<sup>43</sup>

Semangat nasionalisme tersebut mengakar kuat dalam semua pergerakan kebangsaan, baik yang telah berkembang luas seperti Sarekat Islam maupun pergerakan kebangsaan lain seperti PNI, PI, dan Partindo. Semua kegiatan diorientasikan pada perjuangan menuju kebebasan dan kemerdekaan, suatu cita-cita besar bagi semua bangsa yang dijajah. Kerangka semacam itulah yang menggerakkan para pendiri

---

<sup>42</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 83.

<sup>43</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*,p. 87.

bangsa untuk merumuskan suatu konsepsi kenegaraan politik yang mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, dan keagamaan masyarakat.<sup>44</sup>

Sebelum perang 1914, hanya sedikit murid Indonesia yang berhasil sampai ke Universitas di Belanda. Setelah 1918 jumlah mereka meningkat pesat. Banyak murid Indonesia dengan mudah bergaul dengan sesama murid Belanda, tapi pada saat yang sama, mereka makin kuat dengan keyakinan nasionalis mereka berkat pengalaman di Eropa. Pada masa itu Eropa adalah ajang kebangkitan nasional banyak negeri. Bagi Mahasiswa Indonesia di Belanda, kemerdekaan negara-negara Baltik adalah contoh gemilang penerapan liberal dan jujur dari prinsip itu.<sup>45</sup>

Ketika para mahasiswa ini pulang ke Indonesia mereka bergabung dengan kelompok-kelompok nasionalis yang dengan senang hati menerima mereka, dan dalam kasus tertentu mengangkat mereka menjadi pemimpin. Gerakan nasionalis kekurangan orang-orang yang terlatih secara akademis dan secara intelektual sejajar dengan pejabat Belanda. Soepomo salah satu orang yang bergabung dengan tataran pejabat Belanda dalam menghadapi persoalan hukum. Undang-Undang Dasar tidak tumbuh batu demi batu, tetapi dari kepribadian orang-orang

---

<sup>44</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan...*, p. 22.

<sup>45</sup> Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia...*, p. 416-417.

di kota yang berpengaruh dan yang menarik penduduk lainnya di kota tersebut di belakang mereka.<sup>46</sup>

Konsepsi tentang negara integralistik tidaklah dianggap sebagai suatu barang produk dari Soepomo, melainkan mengajukan suatu argumentasi bahwa istilah negara integralistik, totaliter, kekeluargaan, atau manunggaling kawulo-gusti pada intinya adalah suatu cara pandang mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat atau antara negara dan warga negara yang menyelinap dalam benak sanubari sejumlah cendikia pada masa pembentukan dan pada masa permulaan perjuangan membangun sistem hukum nasional. Cara pandang integralistik pada intinya percaya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang unik, menjunjung harmoni, bersifat ketimuran dan tidak bisa dikelompokkan dalam dua bandul besar pertarungan ideologi liberal dan komunisme.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme...*, p. 117.

<sup>47</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 1291.

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN SOEPOMO**  
**TENTANG KONSEP KENEGARAAN INDONESIA**

**A. Perjalanan Pemikiran Soepomo**

Soepomo adalah salah seorang putra bangsa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi dan Soepomo mampu memanfaatkan kesempatan itu secara cermat, tekun dan penuh kesadaran. Soepomo dengan kecerdasan otaknya mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Di lingkungan teman-teman sebayanya, Soepomo terkenal sebagai seorang yang cerdas, pandai dan cermat.<sup>1</sup>

Sebagai seorang putra yang hidup di lingkungan keluarga terhormat Soepomo senantiasa dikenalkan pada nilai-nilai luhur dalam adat-istiadat dan tradisi para leluhurnya. Sikap rendah diri, hormat, patuh, tertib, sopan dan memegang teguh adat-istiadat serta tradisi adalah sifat perwatakan Soepomo sebagai hasil pembinaan leluhurnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. T. Soegito Bc. Hk. *Prof. Mr. Dr. R. Supomo* (Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), p. 3-4.

<sup>2</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 7.

Soepomo menuruni kekuatan moral yang sering diajarkan di dalam keraton, moralitas sangat dijunjung tinggi dalam adat istiadat keraton. Disinilah modal Soepomo mempunyai basis moralitas yang kuat dan juga mempunyai daya jelajah filsuf Jawa, dimana dalam dunia Jawa selalu berpegang pada adat-istiadat yang kental.<sup>3</sup>

Karena kecerdasanya Soepomo segera menyelesaikan pelajarannya di MULO dan karena hasilnya sangat memuaskan Soepomo diijinkan untuk meneruskan pelajaran di sekolah yang lebih tinggi. Atas dasar prestasinya, Soepomo meneruskan studi ke *Rechtschool* di Jakarta pada tahun 1920. Di kota inilah Soepomo mendapat pengalaman yang cukup banyak dan berkenalan dengan pemuda-pemuda lain yang kemudian menjadi pemuka-pemuka pergerakan nasional. Soepomo semakin peka terhadap perkembangan masyarakat, semakin dapat menyelami tantangan zaman. Oleh karena itu, Soepomo segera menyusun konsep yang setepat-tepatnya untuk mencari jawaban bagi bangsanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie Dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme* (Yogyakarta : Thafa Media, 2015), p. 106-107.

<sup>4</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 10.



Namun tidak lama kemudian, Soepomo mendapat *studie opdracht* ke negeri Belanda (12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927). Belajar di negeri Belanda merupakan lembaran hidup baru baginya. Di negeri Belanda pulalah lahir organisasi perjuangan para pelajar dan mahasiswa Indoneisa. Perhimpunan Indonesia atau *Indonesische Vereniging* yang semula bernama *Indische Vereniging* sejak awal abad ke-20 (1908) telah didirikan oleh para mahasiswa di negeri Belanda.<sup>5</sup>

Soepomo bersama kawan-kawannya di negeri Belanda terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Di sela-sela kesibukan pelajarannya, Soepomo selalu isi dengan berbagai kegiatan sosial dan politik terutama bergerak dalam Perhimpunan Indonesia. Di sini, Soepomo mulai menemukan bentuk perasaan nasional dan patriotisme semakin subur dalam lubuk hatinya. Soepomo semakin terpukau oleh keluhuran bangsanya, maka semakin bergairahlah Soepomo meneliti dan mempelajari sendi-sendi hidup dan kehidupan yang hidup subur dalam masyarakat bangsanya. Hukum adat semakin menarik baginya dan semakin mendapat dasar berpijak yang sangat

---

<sup>5</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 11

kuat setelah diilhami perasaan nasional yang dikobar-kobarkan oleh para mahasiswa di negeri Belanda.<sup>6</sup>

Selama di Belanda Soepomo tidak hanya duduk dalam organisasi Perhimpunan Indonesia saja, namun Soepomo pun aktif berdiskusi tentang pemikiran tokoh-tokoh dunia. Seperti tokoh Spinoza, Muller, dan Hegel. Dari tokoh-tokoh besar tersebutlah Soepomo mempunyai pandangan atau pemikiran tentang konsep kenegaraan integralistik, yang diadopsi atau disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia.

Pandangan tentang kesatuan sebuah sistem negara didapatkan Soepomo dari pemikiran Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Ketiga yang dirujuk oleh Soepomo adalah para tokoh di dunia pemikiran filsafat, sebuah cara pandang yang luas dan dalam. Dari Spinoza, Soepomo belajar untuk mengangkat bahu sebagai bentuk rasa hormat pada kebebasan berpikir dan hak atas kedaulatan.<sup>7</sup> Spinoza adalah tokoh yang mempromosikan keadilan, kebaikan hati, dan kebebasan. Lebih lanjut, Spinoza menawarkan pembebasan dalam konsep etikanya. Kebebasan berarti mempertahankan kemungkinan orang tak lagi hanya

---

<sup>6</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 12.

<sup>7</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, . 188.

berangan-angan, mempelajari Spinoza adalah mempelajari sistem hidup.<sup>8</sup>

Soepomo murid dari barat namun tidak terpengaruh dengan budaya barat, budaya barat tidak diterapkan dalam Indonesia, namun sebagai alat untuk menganalisis, atau sebagai pembanding. Sebagai pemikir hukum, Soepomo mengetahui bahwa hukum kolonial yang diadopsi di Indonesia tidak cocok, karena corak dan budayanya berbeda. Maka sebagai seorang ilmuwan hukum, Soepomo selalu mencari resep hukum yang cocok untuk Indonesia.<sup>9</sup>

Soepomo mengungkapkan kehidupan bangsa Indonesia layaknya filsafat pewayangan. Dalam pewayangan terdapat sistem pemerintahan dan pembagian peran yang tersusun apik. Figur dalam pewayangan inilah yang senada dengan apa yang dirujuk oleh Soepomo tentang pemikiran Adam Muller. Muller menawarkan tentang idolisasi konsep abstrak dan koneksinya terhadap era klasik, membuat kesejatan dari diri yang rasional. Maka Soepomo, meskipun sudah menjadi hakim, menteri, kepala Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dimana

---

<sup>8</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 189.

<sup>9</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 108.

Soepomo mempelajari banyak corak hukum, Soepomo tetap setia pada hukum adat, hukum yang terkoneksi dengan era klasik.<sup>10</sup>

Kehidupan masyarakat timur, menurut Hegel sesuai dengan corak alamnya, mereka mudah memproduksi lahan pertanian. Lahan pertanian tumbuh subur, curah hujan cukup bersahabat, dan yang paling penting mereka hidup dalam sistem kekeluargaan. pemikiran Hegelian inilah yang membantu meramu teori sistem versi Soepomo. sebab dsalam sebuah negara yang merdeka, secara otomatis, konsep tentang hak akan berkembang. Dalam melukiskan konsep tentang hak, menjadi manusia dan hormat ke yang lain seperti layaknya manusia. Sebuah konsep abstrak yang fundamental dari filsafat tentang hak. Hegel-lah yang memberikan dasar falsafah terhadap konsep tentang hak.<sup>11</sup>

Pengalaman Soepomo dalam masalah hukum dan keadilan semakin tajam dan berkat bimbingan yang cermat dari Cornelis van Vollenhoven guru besar di Universiteit Leiden. Setelah menyelesaikan studinya di Belanda, maka sepulangnya ke negeri sendiri Soepomo mendapat tugas-tugas yang cukup berat dan beberapa kali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memimpin suatu Pengadilan

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 190-191.

<sup>11</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 191-192.

Negeri. Sebagai murid Cornelis van Vollenhoven, Soepomo mewarisi tahta ilmunya tentang hukum adat.<sup>12</sup>

Dalam dunia sosial dan politik, Soepomo seperti hanya para kaum pergerakan yang lain, aktif dalam pergerakan. Hanya perbedaannya, Soepomo tidak pernah memiliki sifat-sifat ekstrim. Soepomo lebih bersifat loyal, moderat, nasionalis, berkepribadian kekeluargaan, gotong royong. Soepomo lebih cocok dengan politik dan gerakan sosial yang dilakukan oleh Boedi Oetomo atau Parindra. Jiwanya selalu menolak pertikaian, permusuhan dan pertentangan. Persatuan adalah tujuan hidupnya.<sup>13</sup>

Soepomo terkenal sebagai seorang tokoh Boedi Oetomo dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Sesuai dengan kepribadiannya, Soepomo lebih tergerak hatinya oleh organisasi-organisasi yang tidak terlalu radikal, tetapi juga bukan organisasi yang sama sekali tidak berperan dalam memperjuangkan Indonesia Merdeka. Soepomo sangat tertarik oleh perjuangan Boedi Oetomo. Bahka berkat perkenalannya dengan Dr. Soetomo pada sekitar tahun 1922, Soepomo lebih aktif lagi sehingga menjelang tahun 1930 Soepomo menjadi tokoh yang

---

<sup>12</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 16.

<sup>13</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 20.

berpengaruh dalam tubuh Boedi Oetomo.<sup>14</sup> Pada saat itu pulalah, Soepomo terpilih sebagai Wakil Ketua Boedi Oetomo periode 1928-1930.<sup>15</sup>

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Soepomo diperbantukan untuk membantu Mohammad Hatta, yang diberikan kedudukan oleh Jepang sebagai penasehat.<sup>16</sup> Soepomo menerima kedudukan sebagai anggota luar biasa di Pemerintahan Jepang. Anggota luar biasa adalah orang yang pandai dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum. Soepomo diberikan kedudukan di Pemerintahan Jepang sebagai Kepala Kantor Perundang – Undangan.

Pemerintah Jepang ternyata mendengar kehebatan Soepomo dalam bidang hukum. Saat Jepang menduduki Indonesia, *Hooki Kyoku Cho* (Kantor Perundang–Undangan) diberikan kepada Soepomo sebagai Kepala Kantor. Walaupun dibawah penguasa Jepang, hatinya dan jiwanya untuk Indonesia. Jabatan hanyalah alat untuk melindungi rakyatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 25.

<sup>15</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 21.

<sup>16</sup> Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Kemerdekaan Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas, 2011), p. 25.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 24 – 25.

Soepomo tidak aktif di organisasi pada masa Jepang, Soepomo lebih memilih untuk bekerja di Pemerintahan Jepang. Pilihan ini bagian dari strategi politik Soepomo melawan Jepang. Soepomo juga bekerja di Departemen Kehakiman (*Shijibucho*) sebagai pimpinan, bersama dengan Maria Ulfah dan Nani Soewondo yang bertugas untuk menterjemahkan undang–undang dan peraturan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Inggris, agar dapat dimengerti oleh orang – orang Jepang.<sup>18</sup>

kepercayaan kepada Soepomo begitu menjulang, Kepala Departemen Kehakiman diserahkan kepada Soepomo pada tahun 1943.<sup>19</sup> Soepomo memanfaatkan jabatannya demi kepentingan rakyat Indonesia. Strategi yang dijalankan adalah melalui jalan kooperatif terhadap Pemerintahan Jepang. *Kooperasi* (kerjasama) yang dimaksud Soepomo adalah *nonkooperasi*. Politik nonkooperasi yang dasarnya tidak bekerja sama dengan Pemerintah pada batinnya boleh sejalan dengan duduk dalam parlemen. Dan itu menjadi alat senjata perjuangan.<sup>20</sup> Para tokoh bangsa sebagian melakukan jalan politik kopeeratif.

---

<sup>18</sup> “Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia”, <https://dhutag.wordpress.com>, (diakses pada 31 Oktober 2005).

<sup>19</sup> Asshidiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 25.

<sup>20</sup> Mohammad Hatta, *Berjuang dan Dibuang Untuk Negeriku* (Jakarta : Kompas, 2011), p. 60.

Perjalanan hidup itulah akhirnya Soepomo memberikan pandangan konsep kenegaraan Indonesia, yaitu yang bersifat integralistik. Negara Integralistik bukanlah suatu gagasan yang diproduksi sendiri oleh Soepomo, meskipun Soepomo memberikan label dan mempopulerkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai negara integralistik. Negara integralistik hanyalah merk yang dilabelkan oleh Soepomo. Dibalik itu terdapat sekumpulan orang yang menjadi pendukung gagasan yang percaya bahwa masyarakat Indonesia punya suatu kebudayaan asli, berdasarkan pada harmoni, kekeluargaan, antara pemimpin dan rakyatnya menyatu.<sup>21</sup>

## **B. Pemikiran Soepomo Dalam Pembentukan Dasar Negara Integral**

Pada saat memperjuangkan kemerdekaan, Masyarakat Indonesia mencari bentuk – bentuk sosial, ekonomi dan politik yang ada persamaannya yang mengikat Indonesia untuk bersatu dalam sikap dan pandangan politik. Satu sikap dan pandangan sebagai bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah yang disebut integrasi nasional.<sup>22</sup> Soepomo telah menjadi anggota

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 281.

<sup>22</sup> Gusti Adnan Dkk, *Mengabdikan Pada Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah dan Bangsa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), p. 65.



Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diumumkan berdiri tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, yaitu Panglima Jenderal Kumaciki Harada. Pembentukan BPUPKI merupakan realisasi janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.<sup>23</sup>

Sulit memang untuk menelusuri genealogi pemikiran Soepomo, terutama gagasannya mengenai Negara Integralistik. Kekagumannya pada pemikiran Spinoza, Muller dan Hegel, kemungkinan berasal dari pengalamannya studi di Belanda. Keyakinannya pada prinsip hukum adat yang menjadi wilayah keahlian studinya, sebagai ahli hukum adat.<sup>24</sup>

Pandangan Soepomo tentang Dasar Negara menginginkan Negara persatuan yang dimiliki corak asli masyarakat Indonesia, yaitu sifat kekeluargaannya. Pandangan integralistik atau yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong adalah kebudayaan yang pantas dipakai oleh Indonesia dalam Dasar Negara. Dalam Negara Integralistik Soepomo bermaksud mendirikan Negara Indonesia yang

---

<sup>23</sup>St. Sularto dan D. Rini Yunarti, *Konflik Di Balik Proklamasi BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan...*,p. 9.

<sup>24</sup> Daniel Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – Jejak Negara Integralistik Indonesia*, Jurnal Jentera Vol. 3 No.10, Oktober 2005, p. 6-7.

totaliter. Totaliter yang dimaksud oleh Soepomo bukanlah totaliter seperti kekerasan, melainkan totalitas dalam mewujudkan kesatuan bangsa. Soepomo dalam mengkonsep Negara meniru fungsi kerja dalam tubuh manusia, tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian, ada tangan, mulut, kepala, lidah dan lain sebagainya. Bagian tubuh manusia terpisah namun mereka bekerja secara kolektif.<sup>25</sup>

Negara Integralistik menggambarkan bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan menghendaki persatuan. Dalam teks pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945 itu, istilah teori integralistik dikemukakan untuk pertama kali, sebagai suatu jenis konsep Negara, atau teori tentang Negara.<sup>26</sup> Soepomo seterusnya mengatakan : *“ inilah idée totaliter, idée integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata Negaranya yang asli ”*. Konsep Negara integralistik dalam pikiran Soepomo harus menelusurinya melalui pembahasan hukum dalam masyarakat adat di Indonesia. Dikatakan bahwa di dalamnya ditemui ide integralistik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Asshidiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 229-230.

<sup>26</sup> Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik Sumber, Unsur, Dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945* (Jakarta : Grafiti, 2003), p.8-9.

<sup>27</sup> Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik Sumber, Unsur, Dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945...*, p. 11.

Integralistik bukan berarti hendak kembali kepada masa lalu, melainkan gagasan yang hendak membangun masa kini dengan tolak ukur yang diambil dari masa lalu. Pada titik inilah perbedaan gagasan antara Soekarno dan Soepomo dalam konteks bangunan kenegaraan. Soekarno tidak menggunakan desa sebagai tolak ukur dalam membangun negara, melainkan suatu cita-cita progresif kebangsaan sebagaimana menjadi titik tolak kelompok nasionalis di berbagai negara. Sementara itu Soepomo menjadikan desa sebagai tolak ukur dalam membangun ketatanegaraan Indonesia.<sup>28</sup>

Soepomo memberi contoh susunan tata Negara yang asli, yang integralistik dalam masyarakat Indonesia :

*“Kepala desa, atau kepala rakyat wajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan citra-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat memegang adat (kata pepatah minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan”.*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Asshiddiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 282.

<sup>29</sup> Saafroedin Bahar Dkk, *Risalah Sidang Badan Penuelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*, (Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1995. p. 35 – 36.

Soepomo menolak konsep individualisme Barat yang dirujuknya pada filsuf Inggris Jeremy Bentham. Dimana menurutnya konsep ini bertentangan dengan struktur masyarakat desa, yang merupakan semacam soko-guru untuk cermin struktur masyarakat yang lebih luas, serta mewujudkan bentuk paling orisinal dari kesatuan antara pemimpin dan rakyat.<sup>30</sup> Soepomo mengusulkan konsep Negara Integralistik bagi landasan pemerintahan Negara Indonesia dan mempunyai konsekuensi terhadap soal – soal perhubungan Negara dan agama. Dan cara bentukan pemerintahan, perhubungan Negara dengan kehidupan ekonomi ialah konsep Negara yang dinamakannya teori integralistik.<sup>31</sup>

Dasar-dasar yang diajukan Soepomo untuk Indonesia Merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.<sup>32</sup> Soekarno menawarkan gagasan yang cukup sarat dengan ide-ide social democratische dalam sidang BPUPKI. Bahkan cenderung memiliki kesamaan paham, ini bisa dilihat pada konsepsi kekeluargaan dan gotong royong yang diajukan

---

<sup>30</sup> Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – Jejak Negara Integralistik Indonesia...*, p. 6-7.

<sup>31</sup> Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik Sumber, Unsur, Dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945...*, p. 44.

<sup>32</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), p. 69.

Soekarno yang ditawarkan juga oleh Soepomo. Sebagaimana diuraikan dalam pidatonya :

*“Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong! Alangkah hebatnya Negara gotong royong. Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara–saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama–sama! Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu–binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong”*.<sup>33</sup>

Gagasan Soepomo dan Soekarno masih menemukan titik singgung yang sama. Dalam hal meyakini ke-khasan kultur dan struktur masyarakat Indonesia sebagai dasar dari pendirian sebuah Negara. Sekalipun Soepomo tidak secara eksplisit menyebut socio-democratie sebagai prinsip, tapi Soepomo menawarkan sistem koperasi, sebagai sistem perekonomian ideal, sistem koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan.<sup>34</sup>

Konsep Negara Integralistik yang dilontarkan oleh Soepomo sangatlah unik. Sebelum dan sesudah pembacaan pidatonya mengenai

---

<sup>33</sup> Wawan Tunggal Alam, *Bung Karno Menggali Pancasila, Kumpulan Pidato* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), p. 31.

<sup>34</sup> Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – Jejak Negara Integralistik Indonesia...*, p. 14.

Negara Integralistik Soepomo tidak pernah mengungkapkannya lagi. Artinya konsep Negara Integralistik muncul tiba – tiba pada waktu sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Namun membaca pemikiran Soepomo tidak cukup hanya pada sidang di BPUPKI, akan tetapi harus lebih konprehensif baik membaca melalui karyanya, sejarah pergerakannya, dan lingkungan tempat lahir sehingga mempengaruhi pemikirannya.<sup>35</sup>

Pandangan Soepomo tentang paradigma konstitusi mengalami pertumbuhan. Soepomo bukanlah pemikir hukum yang statis, melainkan filsafat hukumnya terbuka bagi segala kaidah pemikiran modern, utamanya dengan ide–ide demokrasi dan hak asasi manusia. Namun Soepomo tetap mempertahankan semangat kebatinan dari hukum adat sebagai sumber material rekonstruksi konstitusi yang hidup di dalam adat sebagai material Indonesia. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan. Sehingga kuat integrasinya dengan pola–pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, aturan dan tindakan yang dianggap patut mengikat para penduduk, dan konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh Kepala Adat dan petugas hukum lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Jimly Asshidiqie Dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p. 227.

<sup>36</sup> Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: Yayasan Nadiya, 2004), p. 63-64.

Dengan mengutip pendapat Soepomo di dalam bukunya Soerjono Soekanto, maka Soepomo menyatakan

*“bahwa untuk mengetahui hukum , maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun, sifat dan susunan badan–badan persekutuan hukum, di mana orang–orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari – hari”*.<sup>37</sup>

Konstitusi yang hidup adalah sebuah konsep refleksi atas metafisika kebangsaan. Sebagai pakar hukum adat, Soepomo menjadikan nilai–nilai yang bersumber dari masyarakat itu sebagai pilar pembangunan konstitusi. Soepomo mempunyai peran besar dalam menerjemahkan hukum adat dan mengangkatnya sebagai norma hukum konstitusi Indonesia. Secara empiris, hukum adat itulah metafisika kebangsaan yang diracik oleh Soepomo supaya tidak menjadi masa lalu, melainkan sumber dari kehidupan yang berguna untuk menatap masa depan.

Konstitusi yang hidup memberikan ruang lebar bagi institusi hukum adat di ruang kebijakan publik dan pengadilan. Soepomo memuat pertimbangan hukum yang hidup, menjadi modal kultural merekonstruksi konstitusi yang hidup. Kepakaran Soepomo atas hukum adat dalam menyusun konstitusi Indonesia melatar belakangi

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 91-92.

bagaimana fakta sosial digali dan dicongkel norma–norma kebudayaannya menjadi teks konstitusi. Sistem hukum adat bersendi atas dasar–dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar–dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Hukum adat dan kearifan lokal menjadi sumber inspirasi bagi Soepomo meracik pemikiran konstitusi. Bagi Soepomo, hukum adat justru tidak mati saat hukum modern ditanamkan dengan transplantasi norma hukum pada konstitusi. Justru dengan semangat hukum adat semakin membara saat terungghah dalam teks konstitusi. Konstitusi yang mengandung akar kebudayaan dan nilai–nilai basis metafisika kebangsaan ini sangatlah penting. Soepomo melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Urgensi mengunggahkan hukum adat dalam konstitusi sesuai dengan model kebanyakan konstitusi di berbagai Negara.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang

---

<sup>38</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia ...*, p. 61.



mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Maka suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama.<sup>39</sup> Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai hukum tersebut. Keadaannya adalah berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal dari negeri Belanda yang merupakan hukum asing bagi warga masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut.<sup>40</sup>

Masyarakat desa merupakan referensi paling sempurna dan orisinal bagi Soepomo. Dimana seharusnya hubungan–hubungan yang tercipta seperti yang ada pada bentuk pemerintahan desa, sebagaimana diuraikannya:

*“Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang masih tetap dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatra dan kepulauan–kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat Negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat Negara senantiasa berwajib memegang teguh dan keseimbangan dalam masyarakat”*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, p.73.

<sup>40</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, p.338.

<sup>41</sup> Bahar, *Risalah Sidang Badan Penuelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945...*, p. 35 – 36.

Soepomo merupakan seorang pemikir, selain itu Soepomo juga seorang negarawan, bisa dilihat dari cara berpikirnya yang asli ke-Indonesia-an. Hasil penelitiannya kemudian ia coba terapkan saat merumuskan konsep Negara Indonesia. Inilah keistimewaan Soepomo, orisinalitas pemikirannya dapat dipertanggung jawabkan.

Pemikiran Soepomo dalam Negara Integralistik, ingin menjadikan Negara ada untuk semuanya golongan, tidak ada golongan masyarakat Indonesia yang diutamakan, semua golongan dipersamakan. Soepomo ingin membangun negeri ini dengan konsep persatuan, semua golongan bahu membahu dalam menggerakkan sistem Negara dan menciptakan kesejahteraan. Soepomo tidak mengharapkan adanya rasa saling tidak percaya antara masyarakat dengan Negara. Jika muncul ketidakpercayaan diantara keduanya, dipastikan ada masalah didalamnya. Saling percaya adalah salah satu unsur untuk menciptakan kedamaian. Jika perdamaian tercipta, maka masyarakat dan Negara dapat membangun kesejahteraan bersama.

Ketika masyarakat sejahtera maka tujuan Negara didirikan dinyatakan berhasil. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

*“kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan*

*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang–Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*<sup>42</sup>

Disinilah letak persamaan pemikiran Soepomo dengan filosofi para penggerak di bantuan hukum. Bisa jadi pemikiran Soepomo mengenai Negara ada untuk semua akan selalu dikawal terus oleh para aktivis bantuan hukum yang cerdas dalam melihat adanya penindasan yang diselimuti dengan kebijakan–kebijakan Negara yang lebih memihak kepada salah satu golongan.

### **C. Peran Soepomo Dalam Pembentukan Rumusan UUD 1945**

Di masa akhir Perang Asia Timur Raya tahun 1945, pada tanggal 29 April 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk satu panitia yang diberi nama *Dokuritzu Zunbi Tjoosakai* (Badan

---

<sup>42</sup> *UUD 45 Dan Amendemen I-IV Dilengkapi UUD RIS, UUDS, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, Proklamasi, Sumpah Pemuda, Arti Lambang Negara, Proklamator RI Dan Pahlawan Nasional, Surat Perintah Sebelas Maret* (Jakarta : Tamita Utama, 2008), p. 1.

Penyelidik Usaha–Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini juga bertugas menyusun rancangan undang–undang dasar yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis.<sup>43</sup> Soepomo pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Pembentukan BPUPKI merupakan pelaksanaan janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dan dilangsungkan atas dasar keputusan Dai Nippon Teikoku Gikai.<sup>44</sup>

Berdasarkan pokok – pokok pikiran Soepomo mengenai Negara Indonesia yang akan dibangun. Paling tidak Soepomo telah meletakkan dasar–dasar pemikiran yang fundamental bagi negara. Dasar–dasar pemikiran inilah yang kemudian mengilhami setiap pasal dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945.

Soepomo merupakan anggota BPUPKI dan juga PPKI, dimana Soepomo menjadi Ketua Komisi Kecil yang bertugas merumuskan UUD 1945. Ketua Panitia Kecil merancang hukum dasar yang sudah

---

<sup>43</sup> Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila* (Jakarta : Konprees, 2017), p. 23.

<sup>44</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 42.

barang tentu peranannya sangat besar. Panitia Perancang Hukum Dasar itu dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI, yang membicarakan tentang rancangan hukum dasar. Panitia kecil ini merupakan bagian dari Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai Soekarno.<sup>45</sup> Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Soekarno itu beranggotakan : AA. Maramis, Otto Iskandar di Nata, BPH Purboyo, Haji Agus Salim, Suhardijo, Soepomo, Ny. Maria Ulfah Santosa, Wongsonegoro, KRM Wuryaningrat, RP Singgih, Tan Eng Hoa, R. Husin Jayadiningrat, dan Sukiman Wiryo Sanjoyo.<sup>46</sup>

Anggota Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar : Soepomo, Wongsonegoro, Achmad Subarjo, AA. Maramis, RP Singgih, Haji Agus Salim dan Sukiman Wiryo Sanjoyo, serta Soepomo sebagai ketuannya. Tugas Panitia Kecil ini ialah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di Rapat Besar dan Rapat Panitia Perancang UUD. Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar di bentuk pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu hari kedua dari sidang kedua BPUPKI. Panitia Kecil Perancang

---

<sup>45</sup>Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – jejak Negara Integralistik Indonesia...*, p. 6.

<sup>46</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 60.

Hukum Dasar diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas – tugasnya.<sup>47</sup>

Pandangan Soepomo tentang paradigma Konstitusi tetap mempertahankan semangat kebatinan dari hukum adat. Hukum sebagai sumber material rekonstruksi konstitusi yang hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia. Sebagai Ketua Perancang Hukum Dasar terhitung dari 11 Juli 1945, terlibat dalam penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Konstitusi Sementara tahun 1950, pemikiran Soepomo mengalami pertumbuhan.<sup>48</sup> Soepomo mempunyai peran besar dalam menerjemahkan hukum adat dan mengangkatnya sebagai norma hukum konstitusi Indonesia. Hukum adat adalah sebuah institusi yang kongkret dan empiris yang hidup di sekeliling masyarakat dan bersama di dalam jiwa sanubari setiap individu.<sup>49</sup>

Soepomo berhasil menyusun rancangan Undang–Undang Dasar, tanggal 13 Juli 1945 kelompok kerja yang dilakukan Soepomo mengajukan hasil kerja mereka kepada komisi redaksi. Komisi redaksi mengadakan perubahan–perubahan kecil, dan meneruskannya kepada

---

<sup>47</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 60 – 61.

<sup>48</sup> Asshidiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p.72

<sup>49</sup> Asshidiqie, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme...*, p.84.

komisi penyelidikan yang bersidang secara pleno.<sup>50</sup> Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang–Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang tanggal 14, 15 dan 16 Juli 1945. Akhirnya, rancangan Undang–Undang Dasar disetujui dengan bulat oleh BPUPKI pada sidangnya tanggal 16 Juli 1945.<sup>51</sup>

Soepomo mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka menyusun Rancangan UUD. Bahkan Soepomolah yang diberi tugas oleh Ketua BPUPKI untuk menjelaskan segala hal yang menyangkut UUD tersebut kepada sidang. Rancangan UUD inilah yang nanti dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Soepomo juga ditunjuk sebagai Panitia Penghalus Bahasa, untuk memperbaiki redaksi Rancangan UUD tersebut, bersama dengan Husein Jayadiningrat dan Haji Agus Salim. Soepomo juga duduk sebagai anggota PPKI yang

---

<sup>50</sup>Lambert Giebels, *Soekarno Biografi 1901 – 1950* (Jakarta : Grasindo, 2001), p.362.

<sup>51</sup>Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 61.

bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia beserta Pembukaannya.<sup>52</sup>

Soepomo selalu mendampingi Soekarno sebagai Ketua PPKI untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan ataupun usul amandemen dari anggota.<sup>53</sup> Mau tidak mau harus diakui bahwa sebagai seorang ahli hukum terkemuka dan sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia serta sebagai seorang patriot, Soepomo besar sekali peranannya. Bahkan tidaklah berlebihan jikalau dikatakan yang terbesar perannya dalam menciptakan dan mewujudkan Undang–Undang Dasar 1945.

UUD 1945 gagasan Soepomo tidak mendapat banyak sanggahan sama sekali. Sanggahan yang paling keras muncul dari Mohammad Hatta, yang mempertanyakan tidak dimasukkannya hak–hak berserikat, bersuara, dan menyatakan pendapat dalam tawaran awal UUD. Bagi Mohammad Hatta, hak–hak ini menjadi sangat penting dalam rangka melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Soepomo menjawab pendapat Mohammad Hatta, ide Mohammad Hatta dianggap mengindikasikan adanya nilai–nilai individualistik demokrasi liberal Barat dalam tawaran Mohammad Hatta. Soepomo juga

---

<sup>52</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 83 – 84.

<sup>53</sup> Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo...*, p. 89.



menyatakan bahwa ide Mohammad Hatta menunjukkan tidak adanya kepercayaan Mohammad Hatta terhadap pemerintahan yang menyatu dengan rakyat. Bahkan, bagi Soepomo, ide Mohammad Hatta justru sangat bertentangan dengan sejatinya paham kekeluargaan.<sup>54</sup>

Mohammad Hatta tidak menolak asas kepemimpinan, tetapi mengingatkan agar tidak dijadikan dogma dan mendesak agar hak kebebasan individu tidak diabaikan. Soepomo menanggapi tentang pertanyaan sampai sejauh mana seorang warganegara harus dilindungi terhadap kekuasaan negara.

*“dalam sebuah demokrasi kerakyatan, seorang warganegara tidak memerlukan perlindungan khusus terhadap negara karena negara adalah keseluruhan warganegara, yang paling penting dalam sebuah negara integral bukannya hak melainkan kewajiban para warganegaranya”*.<sup>55</sup>

Undang–Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang diakui dan dijunjung sebagai landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dan dibaca dalam pidato – pidato Soepomo dalam sidang BPUPKI. Pada masa sidang tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Oleh karena itu, BPUPKI diharapkan dapat menjadi sarana

---

<sup>54</sup>Hutagalung, *Soepomo dan Jejak – jejak Negara Integralistik Indonesia...*, p. 15 – 16.

<sup>55</sup>Giebels, *Soekarno Biografi 1901 – 1950...*, p.363.

memperoleh gambaran tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar hukum negara yang merdeka. Realitasnya adalah, anggota BPUPKI di bawah pimpinan Dr. Radjiman Wediodiningrat mendiskusikan secara mendalam dan berhasil merumuskan bersama bentuk, dasar, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah negara yang merdeka.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Yunarti, *Konflik Di Balik Proklamasi BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan...*, p. 2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas tentang Peranan Soepomo Dalam Merumuskan Dasar Negara Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942 – 1945 pada bab – bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Seperti hanya pahlawan nasional lainnya, Soepomo mempunyai riwayat hidup yang cukup menarik, baik dilihat dari kegiatannya maupun partisipasinya terhadap perjuangan bangsanya. Soepomo tidak pernah absen dalam gelora perjuangan bangsanya, sejak Soepomo sebagai mahasiswa sampai dengan wafatnya. Soepomo tidak pernah menentang arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Soepomo konsekuen terhadap pendiriannya, dan sampai akhir hayatnya Soepomo tetap masih aktif dengan tugas – tugas negara.
2. Pada abad ke-20 dimulainya masa pergerakan nasional dimana masuknya pemikiran-pemikiran Barat maupun Timur, yang nantinya akan dijadikan pengetahuan dan rujukan dalam

membangun bangsa Indonesia. Diantaranya pemikiran-pemikiran yang dipelajari oleh tokoh Indonesia yaitu tentang liberalisme atau individualistik, Islamisme dan Sosialisme-komunisme, serta Nasionalisme sekuler dan integralistik. Isme-isme itulah yang nanti akan dijadikan konsep kenegaraan Indonesia.

3. Peranan Soepomo dalam merumuskan dasar negara telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat besar. Pandangan Soepomo tentang dasar negara menginginkan dasar persatuan, yang dimiliki corak asli masyarakat Indonesia, yaitu sifat kekeluargaannya. Pandangan integralistik atau yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong adalah kebudayaan yang pantas dipakai oleh Indonesia dalam dasar negaranya. Berdasarkan pokok – pokok pemikiran Soepomo mengenai Negara Indonesia yang akan dibangun. Soepomo telah meletakkan dasar – dasar pemikiran yang fundamental bagi Negara.

## **B. Saran**

Di akhir penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini banyak terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan terdapat didalamnya. Banyak hal yang masih belum terungkap. Banyak hal yang belum dibahas, karena kurangnya sumber informasi, kelemahan dan keterbatasan penulis dalam mencarinya.

Dengan selesainya pembahasan Skripsi ini, harapan penulis kepada para pembaca untuk dapat mengambil hikmah dari peran Soepomo yang terlibat dalam merumuskan dasar Negara Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya generasi muda tidak melupakan para tokoh nasional Indonesia dan menghargai, menghormati serta mengapresiasi para pelaku sejarah. Terutama peran Soepomo sebagai tokoh nasional Indonesia yang membawa Kemerdekaan Indonesia.
2. Untuk Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharapkan untuk banyak mendiskusikan tentang tokoh – tokoh nasional Indonesia yang mempunyai peran penting

dalam membangun bangsa Indonesia, sehingga termotivasinya Mahasiswa terhadap peran para tokoh – tokoh bangsa.

3. Untuk Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN “SMH” Banten lebih banyak mendiskusikan dan pengkaji tokoh nasional, karena banyak tokoh – tokoh nasional yang memperjuangkan bangsa Indonesia, masih kurang dibahas kiprah ataupun peranannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. sehingga masih banyaknya mahasiswat yang tidak tau tokoh – tokoh nasional.
4. Kepada Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN “SMH” Banten diharapkan agar menanamkan rasa nasionalisme dalam diri pemuda zaman sekarang untuk bela Negara, seperti para tokoh kemerdekaan Indonesia..